

Kamis, 3 Februari 2022

FM-CC-AAJI-006-00

Judul	Aturan Soal Unit Link Diperketat, Perusahaan Asuransi Angkat Bicara
Nama Media	Tempo.co
Newstrend	Kebijakan Baru Unit Link
Halaman/URL	https://bisnis.tempo.co/read/1556425/aturan-soal-unit-link-diperketat-perusahaan-asuransi-angkat-bicara
Tanggal Berita	2022-02-02
Sentimen	Positif

Aturan Soal Unit Link Diperketat, Perusahaan Asuransi Angkat Bicara

Reporter: [Bisnis.com](#)
Editor: [Kodrat Setiawan](#)

Rabu, 2 Februari 2022 07:18 WIB



Ilustrasi asuransi. Pixabay

TEMPO.CO, Jakarta - Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia menanggapi Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan yang keluar setelah kisruh produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi [unit link](#).

Direktur Eksekutif AAJI Togar Pasaribu mengatakan, penyusunan SEOJK itu telah melalui proses diskusi bersama dengan sejumlah asosiasi asuransi, termasuk AAJI. Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya juga telah mengakomodasi kepentingan industri.

"Kalau terbit, bisa dibayang 90 persen hasil diskusi dengan industri. Ini untuk kebaikan bersama. Sudah fair," ujar Togar kepada Bisnis, Senin, 31 Januari 2022.



Menurutnya, regulasi baru yang akan lebih ketat mengatur produk unit link dari segala sisi tersebut tentunya akan sedikit mengganggu pertumbuhan bisnis unit link karena pelaku usaha butuh penyesuaian diri. Namun, hal itu diyakini hanya akan berlangsung sementara dan justru berdampak baik bagi industri ke depannya.



Apalagi produk regulasi unit link yang ada sudah berusia 15 tahun, sehingga perlu ada penyesuaian. Munculnya keluhan-keluhan masyarakat terhadap produk unit link juga menjadi dorongan untuk dilakukan pembenahan secara end-to-end, mulai dari regulasi, perusahaan asuransi, agen pemasarnya, hingga literasi masyarakat.

"Ini sudah kami diskusikan bersama, mestinya industri sudah mempersiapkan. Regulasi terakhir ini fokusnya ke perlindungan konsumen, jadi bagus itu," tuturnya.

Judul	Aturan Soal Unit Link Diperketat, Perusahaan Asuransi Angkat Bicara
Nama Media	Nkriku.com
Newstrend	Kebijakan Baru Unit Link
Halaman/URL	https://nkriku.com/aturan-soal-unit-link-diperketat-perusahaan-asuransi-angkat-bicara/
Tanggal Berita	2022-02-02
Sentimen	Positif

Homepage / Berita Follow Us   

Aturan Soal Unit Link Diperketat, Perusahaan Asuransi Angkat Bicara

- Berita, Ekonomi





9k SHARES

[Share](#)
[Tweet](#)

SEMRUSH

Empower your brand with Semrush Agency Platform

NKRIKU, Jakarta – Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia menanggapi Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan yang keluar setelah kisruh produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi unit link.

Direktur Eksekutif AAJI Togar Pasaribu mengatakan, penyusunan SEOJK itu telah melalui proses diskusi bersama dengan sejumlah asosiasi asuransi, termasuk AAJI. Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya juga telah mengakomodasi kepentingan industri.

Berita Populer [Seteru OJK dan Bosowa soal Bukopin Bikin Investor Ragu](#)

"Kalau terbit, bisa dibiling 90 persen hasil diskusi dengan industri. Ini untuk kebaikan bersama. Sudah fair," ujar Togar kepada Bisnis, Senin, 31 Januari 2022.

SEMRUSH

Empower your brand with Semrush Agency Platform

SEMRUSH

Empower your brand with Semrush Agency Platform

Menurutnya, regulasi baru yang akan lebih ketat mengatur produk unit link dari segala sisi tersebut tentunya akan sedikit mengganggu pertumbuhan bisnis unit link karena pelaku usaha butuh penyesuaian diri. Namun, hal itu diyakini hanya akan berlangsung sementara dan justru berdampak baik bagi industri ke depannya.

Berita Populer [Tak Ditanggapi OJK, Nasabah Minna Padi Mengadu ke DPR](#)

Apalagi produk regulasi unit link yang ada sudah berusia 15 tahun, sehingga perlu ada penyesuaian. Munculnya keluhan-keluhan masyarakat terhadap produk unit link juga menjadi dorongan untuk dilakukan pembenahan secara end-to-end, mulai dari regulasi, perusahaan asuransi, agen pemasarnya, hingga literasi masyarakat.

Berita Populer [IHSG Ditutup Melemah, Saham Astra dan Bank Mandiri Turun](#)

"Ini sudah kami diskusikan bersama, mestinya industri sudah mempersiapkan. Regulasi terakhir ini fokusnya ke perlindungan konsumen, jadi bagus itu," tuturnya.

Judul	Banyak Aduan Nasabah, Studi IFG Progress Usul Evaluasi Struktur Biaya Unit Link
Nama Media	Bisnis.com
Newstrend	Evaluasi Unit Link
Halaman/URL	https://finansial.bisnis.com/read/20220202/215/1495704/banyak-aduan-nasabah-studi-ifg-progress-usul-evaluasi-struktur-biaya-unit-link
Tanggal Berita	2022-02-02
Sentimen	Positif

Home • Finansial • Asuransi

Banyak Aduan Nasabah, Studi IFG Progress Usul Evaluasi Struktur Biaya Unit Link

IFG Progress menilai rendahnya pemahaman risiko investasi dan tingginya struktur biaya merupakan tantangan utama yang harus ditangani agar produk unit link tetap relevan.

Diana Riantiwa Meliana - Bisnis.com
30 Januari 2022 • 10:30 WIB



Unit Link. Berdasarkan data Departemen Perlindungan Konsumen OJK, pengaduan produk unit link pada periode 2020 tercatat sebanyak 323 laporan konsumen, dan 202 pada 2021 – upnews

Bisnis.com, JAKARTA - Lembaga riset industri jasa keuangan, IFG Progress, mengemukakan agar struktur biaya produk asuransi unit link dievaluasi dan direvisi.

IFG Progress menilai rendahnya pemahaman risiko investasi dan tingginya struktur biaya merupakan tantangan utama yang harus ditangani agar produk unit link tetap relevan.

Melalui studi terbaru yang berjudul Unit Link 101, IFG Progress mengupas tuntas fundamental dari produk unit link, serta perkembangannya di Indonesia.

Reza Jaga : Kian Unit Link Bersih Peringatan Aturan, Perusahaan Asuransi Jiva Menanggapi

Mengutip website Claritas Jasa Keuangan (CJJK), unit link adalah jenis asuransi yang menggabungkan asuransi pemenuhan kebutuhan (life) dengan produk investasi. Dengan kata lain, unit link adalah gabungan antara proteksi sebagaimana umumnya produk asuransi sekaligus juga produk investasi.

your brand
with Semrush
Agency Platform

"Setelah melihat sejumlah produk unit link yang ditawarkan oleh beberapa perusahaan asuransi jiwa di Indonesia, kami menilai perlunya evaluasi dan revisi struktur biaya dari produk unit link. Analisa kami menunjukkan, kinerja portofolio investasi dari produk unit link hingga 5 tahun belakangan relatif di bawah performa benchmark Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan Indonesia Composite Bond Index (ICBI). Apabila tren ini berlanjut, nasabah bisa jadi lebih memilih produk tradisional asuransi dan produk investasi secara terpisah, dan fokus dalam bentuk unit link," ujar Head of IFG Progress Reza Singar melalui siaran pers, dikutip Rabu (2/2/2022).

Hal ini terjadi karena selain biaya akuisisi dan biaya regular pada produk asuransi unit link, terdapat biaya-biaya lain seperti biaya pengelolaan investasi, top-up (isi ulang) premi, pengalihan dana investasi, dan lain sebagainya. Besarnya biaya pengelolaan investasi juga bervariasi tergantung pada jenis unit link yang dipilih nasabah. Semakin tinggi risiko yang diambil, maka akan semakin besar biaya pengelolaan investasi. Dalam hal ini biaya paling besar ada pada jenis investasi dalam bentuk saham, yaitu mencapai 2 persen hingga 3 persen per tahun dari total portofolio.

Reza Jaga : Apa Itu Asuransi Unit Link? Yuk, Pahami Risikonya!

Unit link top-up premi minimum umumnya sekitar Rp1 juta per transaksi dengan biaya sebesar 3 persen hingga 5 persen per transaksi. Biaya pengalihan dana investasi pada umumnya gratis di tahun pertama, namun untuk tahun-tahun selanjutnya akan dikenakan biaya 1 persen dari total nilai akun atau minimal Rp25.000 – Rp100.000 per transaksi.

SEMRUSH
Empower your brand
with Semrush
Agency Platform

Produk unit link merupakan salah satu produk yang diandalkan dan berkontribusi besar bagi industri asuransi jiwa. Pada 2020, CEIC mencatat jumlah pemegang polis individu asuransi unit link tercatat sebanyak 5,9 juta jiwa atau sekitar 38 persen dari total polis individu asuransi jiwa secara keseluruhan. Sementara itu, jumlah pendapatan premi dari produk unit link per tahun 2020 tercatat oleh Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia sebesar Rp77,6 triliun atau menyumbang sekitar 45 persen terhadap total pendapatan premi asuransi jiwa secara keseluruhan.

Namun demikian, pengaduan akan unit link terus meningkat dari tahun ke tahun, di mana total pengaduan yang diterima OJK di 2020 sejumlah 193 aduan meningkat dari 2019 yang sejumlah 232 aduan. OJK mencatat adanya 273 aduan sepanjang kuartal I 2021, yang sebagian besar dilaporkan terkait mis-selling oleh agen asuransi, di mana pemberian penjelasan terhadap produk tidak sesuai dengan detail yang sebenarnya. Mengingat tren pengaduan yang terus tinggi, besarnya modal pasar pada produk unit link ini harus diimbangi dengan pengembangan dan perbaikan pada unit link secara keseluruhan baik dari aspek regulasi, kinerja perusahaan asuransi, maupun dari penguatan edukasi publik terhadap produk asuransi ini.

Reza Jaga : LAPS SJK Siap Fasilitas Nasabah Unit Link dengan Perusahaan Asuransi

Unit link, laporan Unit Link 101 juga memaparkan beberapa risiko yang perlu diketahui nasabah terkait investasi unit link beserta jenis dan karakteristiknya, diantaranya adalah risiko asuransi, risiko investasi, risiko likuiditas, dan risiko operasional. Laporan ini juga merangkul karakteristik dan setiap instrumen dapat menjadi pedoman bagi nasabah dalam menentukan instrumen unit link yang akan dipilih sesuai dengan profil risiko mereka. Pemahaman ini akan mencegah asymetris informasi dari produk unit link ini.

"Informasi dan pemahaman mengenai struktur biaya, potensi skenario risiko dan hasil investasi inilah diperlukan oleh pihak agen asuransi dan dipahami oleh calon pemegang polis unit link. Kami melihat pentingnya peningkatan standar dan pengetahuan proses kualifikasi unit link dapat menjadi bagian dari unit atau agen pemasaran dari produk asuransi dari unit link. Pengembangan secara berkala pada kinerja produk unit link dan evaluasi dari kebijakan yang ada juga menjadi bagian penting dari pengembangan produk unit link secara spesifik dan industri asuransi jiwa pada umumnya," kata Reza.

Judul	Struktur Biaya Unit Link Harus Dievaluasi
Nama Media	Investor.id
Newstrend	Evaluasi Unit Link
Halaman/URL	https://investor.id/finance/280894/struktur-biaya-unit-link-harus-dievaluasi
Tanggal Berita	2022-02-02
Sentimen	Positif



Struktur Biaya Unit Link Harus Dievaluasi

JAKARTA, Investor.id – Lembaga riset industri jasa keuangan IFG Progress menilai, struktur biaya unit link harus dievaluasi agar produk asuransi berbasis investasi tetap relevan di masa kini dan mendatang. Khusus bagi investor yang baru terjun dari pertama kali ke pasar asuransi (newbie), akan kuren lama tentu kebingungan, tak sejalan dengan biaya-biaya yang dibebankan kepada pemegang polis.

Hal itu diungkapkan studi terbaru berjudul Unit Link 101 dari IFG Progress. Studi tersebut mengupas tuntas fundamental dari produk unit link serta perkembangan di Indonesia. Berkatnya, IFG Progress juga media laporan Kinerja Asuransi Jasa Indonesia di Era Covid-19.

Head of IFG Progress Raza Sagar menjelaskan, platform telah mengubah struktur produk unit link yang ditawarkan oleh beberapa perusahaan asuransi jiwa di Indonesia.



Raza Sagar

Head of IFG Progress, Raza Sagar

Menurut dia, diperlukan evaluasi dan revisi struktur biaya dari produk unit link. "Analisa kami menunjukkan, biaya premi relatif dari produk unit link hingga tiga tahun belakangan relatif di bawah pertama berdasarkan NISD dan Indonesia Composite Benchmark (ICBI). Apabila tren ini berlanjut, masalah bisa jadi akan menjadi produk tradisional asuransi dan produk investasi secara khusus, dan bukan dalam bentuk unit link," ujar Raza Sagar, Senin (31/1).

Dia mengatakan, hal itu terjadi karena ada biaya-biaya lain yang dibebankan kepada pemegang polis selain biaya asuransi dan biaya royalti pada produk asuransi unit link. Biaya yang dibebankan adalah biaya penggantian investasi, fee up to 10 persen premi, penggantian dana investasi, dan lain-lain.

Beberapa biaya penggantian investasi bervariasi tergantung pada jenis unit link yang dibeli nasabah. Semakin tinggi risiko yang diambil, maka akan semakin besar biaya penggantian investasi.

Biaya juga. Raza Sagar Unit Link Unggulan Kualitas Indeks Asuransi. Dalam hal ini, biaya paling besar ada pada premi investasi yakni mencapai 2-3% per tahun dari total premi.

Selanjutnya, untuk fee up to premi minimum umumnya sekitar Rp 1 juta per transaksi dengan biaya sebesar 3-5% per transaksi. Biaya penggantian dana investasi pada umumnya gratis di tahun pertama, namun untuk selanjutnya akan dikenakan biaya 1% dari total nilai atau maksimal Rp 25-100 ribu per transaksi.

Produk unit link merupakan salah satu produk yang didominasi dan berkontribusi besar bagi industri asuransi jiwa. Pada 2020, CEO mencatat jumlah pemegang polis individu asuransi unit link sebesar 5,3 juta jiwa atau sekitar 38% dari total polis individu asuransi jiwa secara keseluruhan.



Pengembangan unit link berbasis teknologi digital di masa mendatang akan semakin berkembang.

Sementara itu, untuk persentase premi dari produk unit link tahun 2020 berdasarkan data Asurindo sebesar Rp 71,8 triliun. Nilai tersebut menunjukkan 40% terhadap total pendapatan premi asuransi jiwa secara keseluruhan.

Namun demikian, penggantian akan unit link terus meningkat dari tahun ke tahun. Total pendapatan yang diterima OJK tahun 2020 sebesar Rp 101 triliun, meningkat dari 2019 yang sebesar Rp 230 triliun. OJK mencatat ada 273 akun reasuransi tahun 2021, meningkat dari 2020 yang sebesar 200 akun. Hal ini menunjukkan bahwa asuransi semakin berkembang dan semakin banyak perusahaan asuransi yang menawarkan produk unit link.

Meningkat tren pengaduan yang terus tinggi, besarnya minat pasar pada produk unit link harus diimbangi dengan pengembangan dan perbaikan secara keseluruhan.

Selain dari sisi biaya-biaya, juga dari aspek regulasi, kinerja perusahaan asuransi, maupun dari pengujian etisitas produk terhadap produk asuransi tersebut.

Biaya juga. Raza Sagar Unit Link Unggulan Kualitas Indeks Asuransi. Menurut LAPS.

Unit link, seperti Unit Link 101 juga merupakan beberapa risiko yang perlu dipahami nasabah terkait investasi unit link beserta jenis dan karakteristiknya. Di antaranya risiko asuransi, risiko investasi, risiko kesehatan, dan risiko operasional. Laporan tersebut mengungkap karakteristik dari setiap instrumen dapat menjadi panduan bagi nasabah dalam menentukan instrumen unit link yang akan dibeli sesuai dengan profil risiko mereka. Pemahaman itu akan mencegah asymmetric information dari produk unit link.

"Informasi dan pemahaman mengenai struktur biaya, potensi skenario risiko dan hasil investasi sangat diperlukan oleh pihak asuransi agar dapat dipahami oleh calon pemegang polis unit link. Kami melihat pentingnya pengendalian risiko dan pengendalian proses kualitas unit link dapat menjadi bagian dari unit link. Agar wawasan dari produk asuransi dan unit link," kata Raza.

Dia menambahkan, pengendalian secara bertahap pada produk unit link dan evaluasi dari kebijakan yang ada juga menjadi bagian penting. Khususnya untuk pengembangan produk unit link secara spesifik dan individu asuransi jiwa pada umumnya.

Pengembangan Raza Sagar. Di sisi lain, Lembaga Asuransi Perencanaan Raza Sagar juga mengungkap LAPS SAK juga untuk memfasilitasi perencanaan jangka panjang unit link yang bertujuan untuk keadilan. LAPS SAK membantu perencanaan melalui langkah-langkah perlindungan konsumen.

Kelua LAPS SAK Himpunan Sukertono mendukung kegiatan OJK untuk perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan melalui forum Raza Sagar. Berada untuk memfasilitasi pengalihan risiko LAPS SAK. Tanpa adanya koordinasi tersebut, LAPS SAK tidak bisa memfasilitasi. Raza Himpunan memfasilitasi, Sekeloa (12).

Biaya juga. Raza Sagar Unit Link Harus Dievaluasi dan Perbaikan. Namun, agar LAPS SAK menjadi lebih relevan, masalah produk unit link dan perantara asuransi risiko menjadi hambatan utama. Raza Sagar juga perlu berkoordinasi untuk memfasilitasi pengalihan risiko LAPS SAK. Tanpa adanya koordinasi tersebut, LAPS SAK tidak bisa memfasilitasi. Raza Himpunan memfasilitasi, Sekeloa (12).

Dari Raza Sagar, Raza Himpunan, Raza Sagar dan perantara asuransi yang akan memfasilitasi Raza Sagar melalui Raza Sagar. Raza Sagar juga perlu berkoordinasi untuk memfasilitasi pengalihan risiko LAPS SAK. Tanpa adanya koordinasi tersebut, LAPS SAK tidak bisa memfasilitasi. Raza Himpunan memfasilitasi, Sekeloa (12).

"Kami akan membantu agar prosesnya bisa dilakukan secara cepat dan lebih terarah," terang dia.

Editor: Gora Raza Sagar (@gora_raza_sagar@investor.id)

Judul	Today - Memahami Produk Asuransi Unit Link
Nama Media	CNN Indonesia TV
Newstrend	Edukasi Terkait Unit Link
Halaman/URL	
Tanggal Berita	2022-02-02
Sentimen	Netral



Judul	Industri Menanti Aturan Baru Unitlink
Nama Media	Kontan.co.id
Newstrend	Kebijakan Baru Unit Link
Halaman/URL	https://insight.kontan.co.id/news/industri-menanti-aturan-baru-unitlink
Tanggal Berita	2022-02-02
Sentimen	Netral

BERITA BISNIS

Industri Menanti Aturan Baru Unitlink

Rabu, 02 Februari 2022 | 05:10 WIB

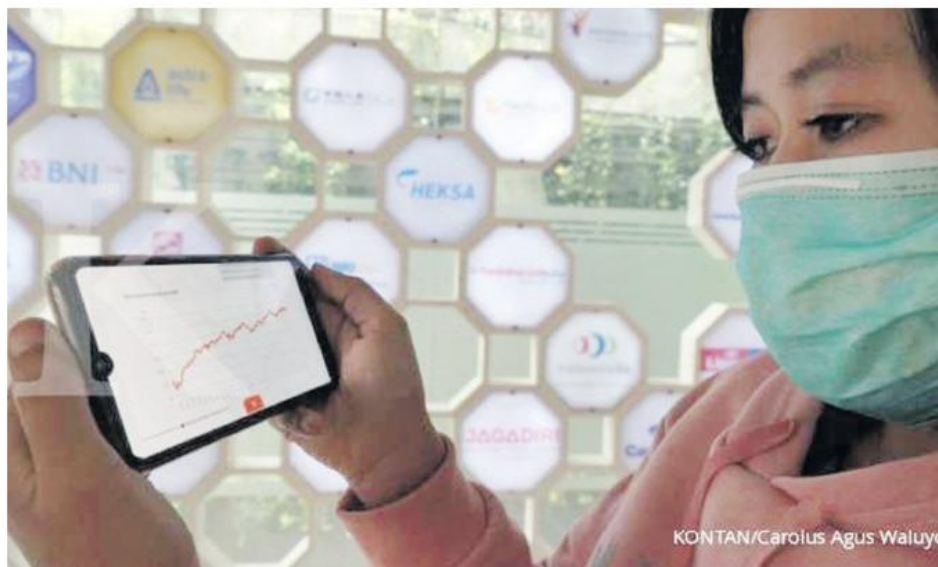


Reporter: **Adrianus Octaviano, Selvi Mayasari** | Editor: **Rizki Caturini**

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam waktu dekat bakal mengeluarkan aturan baru produk asuransi jiwa unitlink untuk penguatan regulasi terkait produk unit link atau Produk Asuransi yang Dikaitkan Dengan Investasi (Paydi). Jika tidak ada aral melintang, aturan ini akan keluar pada Februari ini.

Kepala Eksekutif Pengawas IKNB OJK, Riswinandi menyampaikan, penyempurnaan aturan unitlink meliputi area spesifikasi produk, persyaratan perusahaan untuk dapat menjual unitlink, praktik pemasaran, transparansi produk dan pengelolaan investasi.

Judul	PAAI Tanggapi Aturan Unitlink
Nama Media	Tribun Medan
Newstrend	Opini PAAI Terhadap Regulasi Baru OJK
Halaman/URL	4
Tanggal Berita	2022-02-02
Sentimen	Netral



KONTAN

TIDAK COCOK - Seorang nasabah sedang mengamati kinerja produk unitlink. PAAI menyebut ada beberapa poin poin yang seharusnya diwajibkan dalam aturan unitlink di antaranya keseragaman terkait mekanisme freelook yang memungkinkan pemegang polis untuk membatalkan polisnya jika dirasa tidak cocok.

PAAI Tanggapi Aturan Unitlink

JAKARTA, TRIBUN - Setelah beberapa aduan unitlink makin marak di beberapa waktu belakangan, OJK pun mengeluarkan aturan-aturan baru terkait produk tersebut. Perkumpulan Agen Asuransi Indonesia (PAAI) pun melihat masih ada beberapa poin penting yang seharusnya masuk dalam aturan baru tersebut.

Founder PAAI Wong Sandy Surya pun mengatakan bahwa selama ini pihaknya belum pernah diajak untuk berdiskusi terkait aturan baru tersebut. Harapannya, jika diajak berdiskusi, agen asuransi tidak menjadi pihak yang selalu disalahkan dalam produk unitlink.

Sandy pun bilang ada beberapa poin yang seharusnya diwajibkan dalam aturan unitlink. Pertama, perlu adanya

keseragaman terkait mekanisme freelook yang memungkinkan pemegang polis untuk membatalkan polisnya jika dirasa tidak cocok.

"PAAI belum yakin apakah semua perusahaan asuransi melakukan mekanisme freelook," ujar Sandy.

Selanjutnya, ia juga berharap asumsi cuti premi di ilustrasi dihilangkan. Menurutnya, perlu ditekankan bahwa produk unitlink perlu dibayar seumur hidup.

Bukan tanpa alasan, ia mengungkapkan asumsi cuti premi tersebut terkadang disalahgunakan oleh para agen nakal. Menurut Sandy, beberapa agen nakal terkadang menjual ke calon pemegang polis dengan mengatakan hanya cukup membayar dalam kurun waktu tertentu.

"Agen nakal ini biasanya melintir asumsi cuti premi ini dengan misal bilang bayarnya cukup 10 tahun aja tanpa perlu bayar lagi. Itu kan ga sesuai sebenarnya, karena kalau cadangan nilai tunai tidak mencukupi, pemegang polis harus bayar lagi," imbuh Sandy.

Selanjutnya, Sandy pun mendukung jika ada rencana dari OJK untuk mengatur saham-saham apa saja yang boleh ditempatkan dalam investasi di produk unitlink ini. Harapannya, ada kewajiban laporan per bulan dari perusahaan ke OJK untuk memberikan informasi penempatan aset investasinya.

"Hal ini untuk mencegah kongkalikong seperti kasus Jiwasraya, invest di saham yang busuk," pungkasnya. (Adrianus Octaviano)

Judul	Strategi OJK Menjaga Stabilitas Sektor Keuangan di Masa Pandemi
Nama Media	Bisnis Indonesia
Newstrend	Strategi OJK Menjaga Stabilitas Selama Pandemi
Halaman/URL	5
Tanggal Berita	2022-02-02
Sentimen	Netral

Strategi OJK Menjaga Stabilitas Sektor Keuangan di Masa Pandemi

Presiden Joko Widodo dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2022 (PTIJK 2022), yang diselenggarakan OJK, mengatakan kondisi perekonomian nasional sudah berada dalam jalur yang benar. Ekonomi Indonesia telah bergerak menuju pemulihan dari dampak krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19.

Presiden juga mengapresiasi OJK yang telah berperan besar membantu pemulihan ekonomi nasional yang dilakukan Pemerintah. Hal ini dilakukan secara simultan dengan tetap menjaga stabilitas dan kinerja positif sektor jasa keuangan di tengah krisis ekonomi.

Pemburukan ekonomi akibat pandemi COVID-19 telah mengancam stabilitas sistem keuangan, apalagi jika tidak dilakukan pencegahan (mitigasi) dini. Upaya pencegahan dini ini perlu dilakukan oleh otoritas fiskal (Pemerintah), otoritas moneter (bank sentral) dan otoritas sektor jasa keuangan (OJK). Kebijakan kolaboratif tersebut dapat menjadi "deva penolong" pemulihan ekonomi nasional.

Untuk mengantisipasi dampak pandemi COVID-19, pada Maret 2020 OJK telah terlebih dahulu mengeluarkan *forward looking and countercyclical policies*. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi volatilitas pasar dan *capital outflow*, serta menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Pemerintah dan Bank Indonesia di sisi lain berperan melalui kebijakan stimulus fiskal dan kebijakan moneter yang akomodatif.

OJK telah bergerak cepat mengambil kebijakan yang bertujuan untuk meredakan gejala di sektor jasa keuangan, sekaligus menopang sektor riil dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Untuk mengatasi tekanan di sektor pasar modal, OJK mengeluarkan paket kebijakan untuk meredakan volatilitas pasar, mulai dari pelarangan *short selling*, *buyback* saham tanpa RUPS,

hingga perubahan batasan *auto rejection* dan *trading halt*.

Di sektor perbankan dan industri keuangan non-bank (IKNB), OJK juga mengeluarkan kebijakan restrukturisasi kredit/pembiayaan sehingga memberikan ruang bagi pelaku usaha di sektor riil untuk bertahan. Kebijakan ini juga bermanfaat dalam mempertahankan kondisi neraca industri perbankan dan lembaga pembiayaan.

OJK juga mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi, dengan mempertimbangkan struktur ekonomi Indonesia yang ditopang oleh konsumsi domestik. Kebijakan pertama adalah mempertahankan kondisi stimulus di sektor properti dan kendaraan bermotor, yang memiliki *multiplier effect* tinggi untuk mendorong konsumsi rumah tangga. Kedua adalah mendukung percepatan serapan belanja pemerintah dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi, khususnya pada sektor pertanian. Kebijakan ketiga adalah mendorong pembiayaan dari pasar modal, mengingat peningkatan antusiasme investor ritel domestik di sektor teknologi dan keuangan. Keempat adalah memperluas ruang pertumbuhan ekonomi baru, khususnya yang menyerap banyak tenaga kerja, berorientasi ekspor, dan ramah lingkungan. Kebijakan kelima adalah mendukung program vaksinasi.

DAMPAK KEBIJAKAN DI PASAR MODAL

Dampak kebijakan OJK di pasar modal terlihat sangat nyata. Sejak akhir 2020 IHSG telah kembali ke level sebelum pandemi. Pada akhir 2021 nilai kapitalisasi pasar saham mencapai Rp 8.256 triliun atau naik 18,45% dibandingkan tahun sebelumnya. Pasar Surat Berharga Negara (SBN) juga sudah mulai menguat. Hal ini mengindikasikan kepercayaan investor telah pulih kembali sehingga dapat meningkatkan *capital inflows* dan mengurangi *capital outflows*.



Aktivitas perdagangan juga mencatatkan rekor-rekor baru. Pada tanggal 9 Agustus 2021 terjadi rekor frekuensi transaksi harian tertinggi, yang mencapai 2,14 juta transaksi. Pada tanggal 9 November 2021 terjadi rekor volume transaksi harian tertinggi, yang mencapai 50,98 miliar saham. Rekor kapitalisasi pasar tertinggi terjadi pada tanggal 13 Desember 2021, yang mencapai Rp 8.354 triliun.

Pada sisi permintaan, terjadi peningkatan jumlah investor pasar modal secara signifikan. Pada akhir 2021 jumlah investor mencapai 7,49 juta, atau meningkat hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Angka ini bahkan meningkat hampir tujuh kali lipat jika dibandingkan 2017. Peningkatan jumlah investor tersebut didominasi oleh investor domestik yang berumur di bawah 30 tahun, yang jumlahnya mencapai sekitar 60% dari total investor.

DAMPAK KEBIJAKAN DI IKNB

OJK mengeluarkan empat peraturan khusus untuk mencegah pemburukan dari dampak pandemi COVID-19 di sektor IKNB. Kebijakan tersebut antara lain mengatur restrukturisasi

pembiayaan hingga 2023 dan perpanjangan batas waktu penyampaian laporan berkala.

Kinerja sektor IKNB terjaga relatif baik dan didukung oleh pemodal yang cukup kuat. Hal ini dapat terlihat dari nilai *Risk Based Capital* (RBC) industri asuransi jiwa sebesar 539,8% dan asuransi umum sebesar 327,3%, jauh di atas ambang batas ketentuan sebesar 120%. *Gearing ratio* perusahaan pembiayaan juga mengalami penurunan menjadi 1,98 kali, jauh di bawah batas maksimum sebesar 10 kali. Program restrukturisasi pembiayaan memiliki manfaat yang luas di masyarakat, hingga 17 Januari 2022 nilainya telah mencapai Rp 220,38 triliun dan terdiri atas 5,23 juta kontrak.

DAMPAK KEBIJAKAN DI PERBANKAN

Pada sektor perbankan, OJK telah mengeluarkan sejumlah kebijakan stimulus perekonomian. Salah satu kebijakan yang berdampak luas adalah program restrukturisasi kredit bagi debitur yang terdampak pandemi COVID-19. Hingga akhir 2021, restrukturisasi kredit telah mencapai Rp 663,49 triliun, yang terdiri atas 4,04 juta debitur dengan

76,9% debitur merupakan UMKM.

Pertumbuhan kredit perbankan juga sudah kembali tumbuh positif yaitu sebesar 5,24% pada tahun 2021 (YoY). Pertumbuhan ini utamanya didorong oleh peningkatan kredit UMKM dan ritel. Sementara itu Dana Pihak Ketiga (DPK) mencatatkan pertumbuhan sebesar 12,21% (YoY) sehingga dapat memberikan ruang untuk meningkatkan penyaluran kredit ke depan. Pemodal perbankan juga terjaga relatif baik, nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) mencapai 25,67% atau jauh di atas ketentuan.

LIMA STRATEGI OJK

Presiden Joko Widodo dalam PTIJK 2022 juga meminta agar momentum pemulihan ekonomi terus diperkuat melalui sinergi antara sektor jasa keuangan dan sektor riil. Sinergi ini diarahkan khususnya pada pembiayaan sektor UMKM yang memiliki kontribusi strategis bagi perekonomian nasional.

Menanggapi apresiasi dan arahan Presiden, Ketua Dewan Komisiner OJK Wimboh Santoso menyatakan optimis kinerja industri jasa keuangan pada 2022 akan semakin membaik. Optimisme ini terjadi karena stabilitas sektor keuangan yang terjaga, kebijakan pengawasan yang solid, serta tren pemulihan ekonomi nasional.

OJK memproyeksikan pada 2022 kredit perbankan akan tumbuh di kisaran 6,5% sampai 8,5%. Dana Pihak Ketiga diperkirakan tumbuh pada rentang 9% hingga 11%. Penghimpunan dana di pasar modal juga diperkirakan akan meningkat di kisaran Rp 125 triliun hingga Rp 175 triliun. Piutang perusahaan pembiayaan diperkirakan akan tumbuh pada rentang 11% hingga 13%. Aset perusahaan asuransi jiwa diperkirakan tumbuh sebesar 3,14%. Sementara itu, aset dana pensiun diperkirakan akan tumbuh sebesar 6,47%.

OJK menetapkan 5 kebijakan prioritas pada 2022 untuk memu-

judkan proyeksi positif di atas. Kebijakan prioritas ini juga ditujukan untuk terus memperkuat stabilitas sektor jasa keuangan, mendorong pemulihan ekonomi nasional, dan meningkatkan edukasi dan perlindungan konsumen.

Prioritas pertama adalah memberikan insentif untuk mendorong pembiayaan pada sektor yang menjadi prioritas pemerintah, yaitu pada industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dari hulu ke hilir serta sektor properti. Prioritas kedua, dalam rangka normalisasi kebijakan di negara maju, maka OJK mendorong konsolidasi sektor jasa keuangan agar dapat meningkatkan ketahanan pemodal dan likuiditas. Prioritas ketiga adalah merumuskan skema pembiayaan berkelanjutan di industri jasa keuangan, dengan prioritas pengembangan ekonomi hijau, antara lain dengan penerbitan Taksonomi Hijau Indonesia dan pendirian bursa karbon.

Prioritas keempat adalah memperluas akses keuangan kepada masyarakat, khususnya kepada UMKM. Hal ini dilakukan melalui model klaster atau dalam satu ekosistem pembiayaan, pemasaran (oleh *off-taker*), pembinaan, serta optimalisasi lahan. Upaya ini dilakukan melalui program KUR Kluster, digitalisasi BPR, Lembaga Keuangan Mikro, dan Bank Wakaf Mikro. Pembiayaan UMKM melalui *security crowd funding* di Pasar Modal juga terus akan dikembangkan.

Prioritas kelima adalah memperkuat transformasi digital di sektor jasa keuangan. Hal ini sangat penting dalam meningkatkan akses masyarakat ke produk dan jasa keuangan yang lebih murah dan lebih berkualitas. Hal ini perlu diiringi dengan upaya peningkatan edukasi dan literasi serta perlindungan kepentingan konsumen termasuk penegakan hukum. Kerja sama OJK dengan aparat penegak hukum yang telah menutup akses lebih dari 3.500 pinjaman *online* (pinjol) atau investasi ilegal perlu terus diperkuat. (*)

Judul	Pimpinan OJK Harus Paham Tantangan
Nama Media	Kontan
Newstrend	Seleksi Dewan Komisiner OJK
Halaman/URL	9
Tanggal Berita	2022-02-02
Sentimen	Netral

■ SELEKSI PIMPINAN OJK

Pimpinan OJK Harus Paham Tantangan

JAKARTA. Bursa calon anggota dewan komisiner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) kian ramai. Setidaknya ada 155 peserta yang dinyatakan lolos seleksi tahap pertama.

Mereka berasal dari beragam profesi mulai dari dosen, direksi perusahaan hingga pejabat pemerintah. Dari jajaran nama calon anggota DK OJK tersebut, terdapat beberapa nama yang sudah tidak asing di industri jasa keuangan dalam negeri.

Seperti mantan Deputy Gubernur Bank Indonesia (BI) Mirza Adityaswara, Wakil Menteri Luar Negari Mahendra Siregar, Direktur Utama BEI, Inamo Djajadi dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae.

Kemudian Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir, Wakil Direktur Utama Periode 2015-2020 Bank Mandiri Sulaiman Arif Arianto dan Direktur Utama BRI Sekuritas, Frierica Widyasari Dewi.

Iskandar misalnya, mengungkapkan alasan keikutsertaannya karena ingin memperbaiki dan memperkuat pengawasan OJK di sektor keuangan. "Banyak perusahaan asuransi bermasalah, fintech ilegal, inklusi keuangan syariah yang masih rendah dan pengawasan yang terkotak-kotak," kata Iskandar, Selasa (1/2).

Dendi Ramdani, yang juga jadi calon DK OJK bertekad memperbaiki sektor jasa keuangan agar lebih efisien dan efektif. Dendi kini menjabat Head of Industry and Regional Research Bank Mandiri.

Ekonom dan Direktur Riset CORE Indonesia Piter Abdullah menyebut, OJK butuh sosok yang paham tantangan dan juga membawa solusi bagi sektor keuangan, apalagi sekarang sudah era digital.

Pimpinan OJK harus punya rekam jejak baik dan pengetahuan luas di industri keuangan.

"Ada beberapa sosok saya kira potensial seperti Mirza Adityaswara," ujar Piter.

Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), Amin Nurdin menambahkan, kriteria pimpinan OJK juga harus memiliki rekam jejak yang baik dalam industri keuangan dan perbankan. Serta pengetahuan luas terkait industri keuangan dan perbankan. Tantangan sektor jasa keuangan akan mencakup geopolitik, tantangan ekonomi global, digitalisasi, keamanan siber, dan pengembangan SDM.

Ferrika Sari



ANTARA/Aditya Pradana Putra

Setidaknya ada 155 peserta yang dinyatakan lolos seleksi tahap pertama.

Judul	Luncurkan Layanan PLUS, BTN Targetkan Dana Kelolaan Nasabah Tajir Rp 45,9 Triliun
Nama Media	Kontan.co.id
Newstrend	Re-launch BTN Prioritas
Halaman/URL	https://keuangan.kontan.co.id/news/luncurkan-layanan-plus-btn-targetkan-dana-kelolaan-nasabah-tajir-rp-459-triliun
Tanggal Berita	2022-02-02
Sentimen	Netral

KEUANGAN / BANK

Luncurkan Layanan PLUS, BTN Targetkan Dana Kelolaan Nasabah Tajir Rp 45,9 Triliun

Rabu, 02 Februari 2022 / 14:28 WIB



Nasabah BTN prioritas mencari informasi laporan FLD di saat re-launching BTN Prioritas di Jakarta, Rabu (2/2).



Reporter: Dina Mirayanti Hutaeruk | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) tengah fokus membesarkan bisnis layanan nasabah tajir. Untuk itu, perseroan meluncurkan ulang layanan BTN Prioritas dengan meluncurkan tagline baru yakni *Defining Your Priority*.

Dengan tagline baru yang akan menciptakan *customer value proposition* baru, BTN menargetkan dana kelolaan bisnis *wealth management* tahun ini sebesar Rp 45,9 triliun. Itu meningkat dari tahun 2021 sebesar Rp 41,4 triliun.



Direktur Distribution and Retail Funding Bank BTN, Jasmin mengatakan, kesadaran masyarakat untuk berinvestasi terus meningkat di Indonesia baik melalui reksadana, pasar saham maupun surat berharga lainnya. Namun banyak masyarakat yang belum mengerti mengenai menginvestasikan uang mereka secara baik.

"Kami di Bank BTN ingin bisa membantu masyarakat untuk mengelola keuangan mereka secara baik. Untuk itulah Bank BTN menghadirkan kembali BTN Prioritas dengan konsep yang baru yakni *Defining Your Priority* dalam memenuhi kebutuhan nasabah," ujar Jasmin dalam konferensi pers peluncuran dan *re-launching* BTN Prioritas "Defining Your Priority" di Jakarta, Rabu (2/2).

Dengan hadirnya wajah baru BTN Prioritas, Jasmin berharap Dana Pihak Ketiga (DPK) yang ditargetkan tumbuh *double digit* bisa tercapai. Selain itu, beragam produk yang ditawarkan BTN Prioritas juga bisa mendorong kenaikan *fee based income* perseroan.

Baca Juga: [BTN Catatkan Pertumbuhan Penyisihan FLLP 473% di Januari](#)

Jasmin mengungkapkan, perseroan menyadari bahwa setiap nasabah memiliki prioritas yang berbeda dalam setiap aspek kehidupan. Itulah sebabnya BTN Prioritas hadir untuk memberikan solusi finansial dan layanan yang relevan dan berkesinambungan untuk setiap Nasabah BTN Prioritas.

Dia menjelaskan, *Defining Your Priority* juga merupakan semangat baru dari BTN Prioritas agar Nasabah memiliki kebebasan memilih kebutuhan dan layanan prioritas yang sesuai dengan gaya hidup mereka.

Nasabah dapat menikmati kebebasan sesungguhnya dengan berbagai layanan spesial dan penawaran eksklusif dari BTN Prioritas dan jadilah pribadi yang istimewa karena kebebasan memilih adalah arti sesungguhnya dari nasabah prioritas.

Menurut Jasmin, dengan peluncuran *Defining Your Priority*, BTN Prioritas akan meningkatkan layanan dan menghadirkan inovasi-inovasi terbaru dari segi variasi produk, manfaat terbaik, *privilege* serta layanan istimewa melalui produk dana, investasi, dan proteksi yang beragam, serta *loyalty program*, dan *priority service*.

Dari *action plan* tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan dan kepuasan Nasabah BTN Prioritas, sehingga semakin mempercayakan BTN Prioritas dalam mengelola finansial Nasabah.

"BTN Prioritas menyadari bahwa untuk meningkatkan *customer loyalty* dan *experience* saat ini tidak lagi hanya berfokus pada solusi produk saja namun juga pada kemampuan untuk memahami kebutuhan Nasabah di segala aspek kehidupannya melalui berbagai pilihan *loyalty reward*," katanya.

Judul	DK OJK Diminta Selesaikan Permasalahan Industri Keuangan
Nama Media	Ekonomi Neraca
Newstrend	Seleksi Dewan Komisiner OJK
Halaman/URL	5
Tanggal Berita	2022-02-02
Sentimen	Netral

DK OJK Diminta Selesaikan Permasalahan Industri Keuangan

Jakarta – Perkembangan industri keuangan yang semakin bergerak aktif perlu dibarengi dengan kebijakan untuk melindungi tak hanya konsumennya saja namun juga pelaku usahanya. Hal itulah yang menjadi tugas untuk Ketua dan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2022-2027 mendatang.

■ NERACA

Bebberapa pengamat menilai biang masalah yang ada di industri keuangan bisa terselesaikan seperti masalah pinjaman online, perbankan, asuransi hingga multifinance. Pengamat asuransi Irvan Rahardjo mengatakan calon Ketua dan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2022-2027 perlu menyelesaikan sejumlah persoalan terutama yang berkaitan dengan pinjaman online.

"Ketua dan anggota DK OJK juga perlu menyelesaikan persoalan terkait asuransi gagal bayar, memperkuat ekosistem finansial teknologi (fintech), dan membentuk lembaga penjamin polis," kata Irvan, seperti dikutip Antara, kemarin.

Ia berharap agar Ketua dan Anggota DK OJK 2022-2027 yang terpilih dapat memberi afirmasi dan

memperkuat fungsi perlindungan bagi konsumen jasa keuangan, serta melakukan penyidikan dan penyelesaian kasus yang ditinggalkan oleh Dewan Komisiner sebelumnya. "DK OJK 2022-2027 juga diharapkan dapat meningkatkan pengawasan sejalan dengan fungsi pengaturannya," imbuh Irvan.

Sementara itu, Ekonom Bhima Yudhistira mengatakan Calon Ketua dan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu memiliki keahlian spesifik di industri jasa keuangan.

"Sebagai Dewan Komisiner OJK, sebaiknya know how atau expertise di industri keuangan yang spesifik menjadi syarat penting karena industri jasa keuangan relatif luas, ada perbankan, asuransi, fintech, hingga multifinance tentu masing-masing memiliki problem yang unik," kata Bhima.

Kemampuan melihat detail masalah sektoral se-

perti isu pengawasan, pengaduan nasabah, keamanan transaksi, dan literasi keuangan, menurutnya juga sangat dibutuhkan oleh DK OJK. "Sebisamungkin DK OJK ada yang berasal dari profesional dengan jam terbang yang panjang," kata Bhima yang juga Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios).

Dengan kecepatan perkembangan teknologi yang memunculkan industri baru, payung regulasi yang tepat sangat dibutuhkan. Apabila regulasi terlalu ketat, ia mencontohkan industri asuransi digital (insurtech) yang baru lahir dapat layu sebelum berkembang, sebaliknya aturan yang terlalu longgar juga dapat menimbulkan masalah baru.

"Jadi pengetahuan terkait perkembangan teknologi finansial penting dimiliki oleh DK OJK. Untuk masalah Pinjol ilegal saja kan cukup lama mengatasi persoalan itu, ke depan harapannya bisa lebih responsif," imbuhnya. Saat ini, fenomena cryptocurrency dengan transaksi tembus Rp-1,7 triliun per hari juga tengah berkembang.

Menurut Bhima diperlukan peran OJK untuk turut mengatur cryptocurrency karena termasuk dalam kategori investasi keuangan

digital. Selanjutnya, Calon Ketua dan Anggota Dewan Komisiner OJK juga harus berintegritas, karena tantangan di jasa keuangan semakin kompleks. "Maka Dewan Komisiner OJK dituntut untuk profesional tidak berkaitan dengan politik praktis, khususnya menjelang pemilu 2024," imbuhnya.

Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang merupakan Ketua Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) Periode 2022-2027 telah menetapkan sebanyak 155 nama lolos seleksi tahap I atau seleksi administrasi DK OJK.

Irvan pun memperkirakan setelah tahap selanjutnya, peta calon Ketua dan Anggota Dewan Komis OJK tidak banyak berubah. "Calon Ketua dan Anggota DK OJK 2022-2027 akan diisi oleh figur-figur dari unsur Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), yakni Bank Indonesia (BI), Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Ditambah juga beberapa unsur profesional dari Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank," ucapnya. bari@ant

Judul	Berita Foto - Premi Asuransi
Nama Media	Investor Daily
Newstrend	Kinerja Asuransi Jiwa 2021
Halaman/URL	23
Tanggal Berita	2022-02-02
Sentimen	Netral



Premi Asuransi

Karyawan PT Panin Dai-ichi Life melakukan aktivitas kerja di Jakarta, belum lama ini. Berdasarkan data OJK, premi asuransi tradisional menunjukkan peningkatan selama tahun 2021. Hingga kuartal III/2021 tumbuh 15,7% YoY menjadi Rp 56,04 triliun dari sebelumnya Rp 48,43 triliun di 2020.

Judul	Waduh! Izin Usaha AJB Bumiputera Terancam Dicabut OJK
Nama Media	Bisnis.com
Newstrend	Pencabutan Izin AJB Bumiputera
Halaman/URL	https://finansial.bisnis.com/read/20220202/215/1495885/waduh-izin-usaha-ajb-bumiputera-terancam-dicabut-ojk
Tanggal Berita	2022-02-02
Sentimen	Netral

Home • Finansial • Asuransi

Waduh! Izin Usaha AJB Bumiputera Terancam Dicabut OJK

Berbagai upaya pemertanian Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 telah dilakukan sejak pengesahan masih di Kementerian Keuangan, tetapi hingga hampir 25 tahun ini, persoalan tak kunjung selesai.

Diana Febriana Melinda - Bisnis.com
02 Februari 2022 | 10:00 WIB



Pemertanian yang menjadi tujuan sejak masa pemerintahan Joko Widodo (JW) Bumiputera 1912 tak kunjung selesai karena belum ada kepastian hukum. (Foto: Kurniawan / Antara)

Bisnis.com, JAKARTA — Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 terancam dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kapita Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank OJK Roswandi mengatakan lembaga sebenarnya telah memberikan diskeksi atas pelanggaran ketentuan kesehatan perusahaan yang terjadi di AJB Bumiputera. Diskeksi tersebut diberikan sementara untuk memberikan kesempatan kepada manajemen perusahaan agar dapat memperbaiki kesehatan keuangan perusahaan.

"[Diskeksi] ini kelihatannya kami akan melakukan pembatasan sehingga kalau pembatasan dilakukan yang terkait dengan kesehatan itu, mereka tidak akan bisa memenuhi dan tentu ujungnya sesuai dengan pengawasan kehati-hatian, yang paling konservatif adalah tidak dapat dilanjutkan usahanya ini," ujar Roswandi dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (2/2/2022).

Bisa Juga : OJK: Penyelesaian Masalah AJB Bumiputera Sangat Berat

Dia mendukung OJK sudah memberikan waktu yang cukup lama kepada perusahaan untuk melakukan perbaikan. Perlu diketahui permasalahan AJB Bumiputera ini sudah terendus sejak 1997, di mana saat itu perusahaan sudah mengalami defisit ekuitas Rp2,07 triliun. Berbagai upaya penyelesaian telah dilakukan sejak pengesahan masih di Kementerian Keuangan, tetapi hingga hampir 25 tahun ini, persoalan tersebut tak kunjung selesai.



Upaya penyelesaian AJB Bumiputera juga dinilai sulit dilakukan lantaran perusahaan asuransi ini mengalami perusahaan berbentuk mutual di mana pemegang polis juga memiliki pemegang saham. OJK pun hanya bisa mengarahkan penyelesaian dilakukan sesuai anggaran dasar perusahaan.

Apalagi, hingga saat ini, Badan Penyelidikan Anggota (BPA) yang memiliki fungsi strategis dalam penyelesaian perusahaan masih mengalami kekosongan dan pembentukannya dinilai tertunda-tunda. Pada 10 Januari 2022, panitia pemilihan BPA telah menetapkan sembilan calon BPA dan 11 daerah. Masih terdapat ketidakpastian penetapan calon BPA dan dua daerah, yakni Sumbagel dan DKI Banten. OJK pun masih menunggu kelengkapan seluruh calon BPA untuk dilakukan fit dan proper test.

"Kalau di perusahaan lain itu ada pemegang saham sehingga kami bisa kejar pemegang sahamnya. Kalau di sini, pemegang saham atau pemiliknya itu adalah para pemegang polis, jadi sulit untuk melakukan itu," katanya.



Adapun, OJK mencatat defisit ekuitas perusahaan mencapai Rp21,9 triliun per 31 Desember 2021. Hal ini disebabkan aset perusahaan sampai dengan akhir tahun lalu hanya tinggal Rp10,7 triliun, sedangkan liabilitas perusahaan sudah mencapai Rp32,63 triliun.

Indikator kesehatan keuangan perusahaan juga jauh di bawah ketentuan minimum yang ditetapkan OJK, antara lain rasio based capital (RBC) mencapai minus 1.164,77 persen per Desember 2021, rasio kecukupan investasinya sebesar 12,11 persen, dan rasio likuiditas perusahaan tercatat hanya sebesar 16,4 persen.

Di samping itu, AJB Bumiputera saat ini juga memiliki utang klaim atas 494.178 polis dan 521.917 orang peserta, dengan nilai polis yang diklaim mencapai Rp4,8 triliun. OJK telah memberikan sanksi peringatan SP 1 kepada perusahaan terkait utang klaim tersebut.

Namun, hingga batas waktu 23 Desember 2021, AJB Bumiputera belum menyelesaikan kewajiban utang klaim tersebut. OJK pun tengah memproses untuk meningkatkan sanksi peringatan ke tahap selanjutnya, yaitu SP 2, SP 3, sanksi pembatasan kegiatan usaha, hingga sanksi pencabutan izin usaha.

"Kami sedang dalam proses untuk meningkatkan sanksi administrasinya," kata Roswandi.

Judul	OJK: Penyelesaian Masalah AJB Bumiputera Sangat Berat
Nama Media	Bisnis.com
Newstrend	Pencabutan Izin AJB Bumiputera
Halaman/URL	https://finansial.bisnis.com/read/20220202/215/1495836/ojk-penyelesaian-masalah-ajb-bumiputera-sangat-berat
Tanggal Berita	2022-02-02
Sentimen	Netral

Home • Finansial • Asuransi

OJK: Penyelesaian Masalah AJB Bumiputera Sangat Berat

Per 31 Desember 2021, aset Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 senilai Rp10,7 triliun, sedangkan liabilitas perusahaan sudah mencapai Rp32,63 triliun. Artinya ada defisit ekuitas sebesar Rp21,9 triliun.

Denis Pliantiza Mediana - Bisnis.com
30 Januari 2022 • 14:49 WIB



Suana pertemuan antara OJK dengan sejumlah pemegang polis, sekitar pejabat, dan agen asuransi Jiwa Bersama atau AJB Bumiputera 1912, Selasa (1/2/2022) - simensa

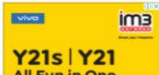
Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai upaya penyelesaian **Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912** sudah sangat berat dilakukan. Hal ini mengingat kewajiban yang ditanggung perusahaan mutual ini sudah sangat besar.

Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Riswandi menyampaikan, AJB Bumiputera mencatatkan defisit ekuitas sebesar Rp21,9 triliun per 31 Desember 2021. Hal ini disebabkan aset perusahaan sampai dengan akhir tahun lalu hanya tinggal Rp10,7 triliun, sedangkan liabilitas perusahaan sudah mencapai Rp32,63 triliun.

"Aset untuk Desember 2021 itu nilainya Rp10,7 triliun. Ini yang nilainya lumayan itu adalah properti yang kurang lebih mencapai Rp6 triliun," ujar Riswandi dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (2/2/2022).

Baca Juga : Klaim Tak Kunjung Dibayar, Nasabah Bumiputera Geruduk Kantor OJK Sampaikan Somasi

Indikator kesehatan keuangan AJB Bumiputera juga berada dalam kondisi yang tidak sehat. Riswandi melaporkan, rasio solabilitas atau risk based capital (RBC) perusahaan mencapai minus 1.164,77 persen per Desember 2021 atau jauh di bawah ketentuan minimum sebesar 120 persen. Rasio kecukupan investasinya juga hanya sebesar 12,11 persen, jauh dari standar yang seharusnya di atas 100 persen. Pun rasio likuiditas perusahaan tercatat hanya 16,4 persen, juga jauh di bawah standar yang sekurang-kurangnya 100 persen.

Sementara itu, OJK mencatat pemegang polis AJB Bumiputera saat ini sebanyak 2,16 juta pemegang polis, turun jauh dibandingkan 2016 yang mencapai sekitar 6,5 juta pemegang polis. Adapun, nilai kontrak atau pertanggungan dari 2,16 juta pemegang polis tersebut hingga saat ini mencapai Rp20,06 triliun. Sementara itu, total kewajiban hingga habis kontrak atau sampai dengan jatuh tempo dari 2,16 juta pemegang polis itu mencapai Rp62,9 triliun.

"Jadi kalau kita lihat jumlah Rp20,06 triliun ini dihubungkan dengan aset yang Rp10,7 triliun, di mana yang bemilai properti itu hanya Rp6 triliun, memang sudah kelihatan jomplangnya perusahaan ini kalau mau menyelesaikan kewajiban. Tapi kalau lihat lagi dari nilai kontrak dari 2,1 juta pemegang polis itu nilai kontraknya Rp62,9 triliun. Jadi memang sudah sangat, sangat berat sekali," kata Riswandi.

Baca Juga : OJK Batasi Kegiatan Usaha Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera

Di samping itu, AJB Bumiputera saat ini juga memiliki utang klaim atas 494.178 polis dengan peserta 521.917 orang. Nilai polis yang diklaim ini mencapai Rp8,4 triliun.



Dengan kondisi keuangan dan besarnya kewajiban yang harus dibayarkan oleh AJB Bumiputera tersebut, Riswandi menilai akan sangat berat menyelesaikan penyelesaian perusahaan tersebut dengan cara-cara biasa. Apalagi, AJB Bumiputera ini merupakan perusahaan berbentuk mutual di mana pemegang polis juga merupakan pemegang saham.

"Di dalam anggaran dasarnya, perusahaan yang mutual ini memang penyelesaian itu di situ diatur, kalau perusahaan mendapatkan untung maka untungnya boleh dibagi. Kalau perusahaan ini mendapat rugi, kerugian itu harus ditanggung bersama. Ini masalahnya waktu kami panggil rapat panjang waktu itu disampaikan bahwa mereka memang para nasabah ini tidak pernah tahu kalau usaha ini mutual," tuturnya.

Judul	OJK: IFG Life Boleh Ngutang untuk Tambah Modal
Nama Media	Cnbcindonesia.com
Newstrend	Diskresi IFG Life
Halaman/URL	https://www.cnbcindonesia.com/market/20220202140347-17-312323/ojk-ifg-life-boleh-ngutang-untuk-tambah-modal
Tanggal Berita	2022-02-02
Sentimen	Netral

CNBC Indonesia > Market > Berita Market

OJK: IFG Life Boleh Ngutang untuk Tambah Modal

MARKET - Monica Wazara, CNBC Indonesia
02 February 2022 10:05

SHARE | [f](#) [t](#)



Foto: Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank, Anggota Dewan Komisiner OJK Riswinandi. (CNBC Indonesia/Titi Susilo)

Jakarta, CNBC Indonesia - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan memberikan diskresi aturan kepada perusahaan asuransi milik pemerintah, PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life) untuk bisa melakukan penambahan modal melalui pinjaman. Langkah ini dilakukan untuk memenuhi modal perusahaan yang menerima polis restrukturisasi PT Asuransi Jivara (Persero) tersebut.

Dewan Komisiner Pengawas IKNB OJK Riswinandi mengatakan saat ini IFG Life telah mendapatkan modal dari pemerintah melalui penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp 20 triliun. Sedangkan kebutuhan modal yang diperlukan mencapai Rp 26 triliun.

"Realisasinya baru Rp 20 triliun, jadi masih kurang Rp 6 triliun nah untuk ini IFG koordinasi dengan bank Himbara, keliatannya ada pinjaman," kata Riswinandi dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (2/2/2022).

MENARIK UNTUK ANDA



Sesok Inj jadi "Mak Comblang" bagi Ahok & Puput
Suamiku Terkejut! Lemak di Perut Hilang

Baca: Bobroknya Asuransi & Pinjol Ilegal Jadi Fokus Calon Bos OJK

"Isunya adalah, modal itu tidak boleh dari pinjaman. Jadi mungkin kalo tujuannya untuk penyehatan ini perusahaan pemerintah mungkin kita bakal melakukan diskresi sumber modal dari pinjaman," lanjutnya.

Untuk diketahui, IFG Life saat ini merupakan anak usaha dari PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)/BPUI. Saat ini perusahaan tersebut telah menjadi holding BUMN Perasuransian dan Penjaminan.

IFG Life menerima pengalihan aset-aset dari Jivara yang telah direstrukturisasi, baik dalam bentuk aset polis maupun aset likuid lainnya.

Penandatanganan akta pengalihan tahap pertama sudah mulai dilakukan pada 15 Desember 2021 lalu dengan nilai Rp 33,02 triliun. Sedangkan total jumlah nasabah mencapai lebih dari 300 ribu nasabah.

Baca: Cegah Korupsi di BUMN, Erick Minta Revisi UU Keuangan

Terpisah, Direktur Utama IFG Robertus Billiea mengatakan dalam rangka penguatan struktur modal IFG Life, IFG telah menerima mandat berupa Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 20 triliun dan melakukan fundraising senilai Rp 6,7 triliun.

"IFG Life dibentuk untuk memperkuat ekosistem IFG holding dalam memberikan layanan di bidang asuransi jiwa dan kesehatan. Belajar dari beberapa kondisi yang kurang baik di industri sebelumnya, portofolio perusahaan akan dikelola secara profesional dan akuntabel sehingga kesehatan finansial perusahaan senantiasa terjaga. IFG Life diharapkan dapat menjadi role model perusahaan asuransi jiwa yang sehat dan berkelanjutan," terang dia.

Judul	OJK Perketat Aturan Produk Unit Link, Bagaimana Dampaknya ke Industri Asuransi?
Nama Media	Tempo.co
Newstrend	Dampak Pengetatan Aturan Unit Link
Halaman/URL	https://bisnis.tempo.co/read/1556640/ojk-perketat-aturan-produk-unit-link-bagaimana-dampaknya-ke-industri-asuransi
Tanggal Berita	2022-02-02
Sentimen	Positif

HOME > BISNIS >

OJK Perketat Aturan Produk Unit Link, Bagaimana Dampaknya ke Industri Asuransi?

Reporter: [Bisnis.com](#)

Editor: [Rr. Ariyani Yakti Widyastuti](#)

Rabu, 2 Februari 2022 17:22 WIB

KOMENTAR



Pekerja membersihkan logo asuransi di kantor Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, Jakarta, Selasa, 8 Juni 2021. Bisnis asuransi jiwa kian melonjak memasuki tahun 2021. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Kalangan industri asuransi merespons rencana Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memperketat aturan soal produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) yakni [unit link](#).

Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Togar Pasaribu, memperkirakan regulasi itu sedikit banyak akan sedikit mengganggu pertumbuhan bisnis unit link. Sebab, tiap pelaku usaha butuh waktu untuk menyesuaikan diri.

Namun begitu, Togar yakin, penyesuaian hanya akan berlangsung sementara dan bakal berdampak baik bagi industri di masa mendatang. Apalagi, regulasi unit link yang ada kini telah berusia 15 tahun, sehingga perlu ada penyesuaian.

Ia menyatakan sejumlah keluhan masyarakat terhadap produk unit link juga menjadi dorongan untuk dilakukan pembenahan secara *end-to-end*, mulai dari regulasi, perusahaan asuransi, agen pemasarnya, hingga literasi masyarakat.



Kalangan industri pun berharap regulasi anyar dalam bentuk Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) itu cukup berimbang dari sisi perlindungan konsumen dan keberlangsungan industri asuransi.

Perumusan aturan itu, kata Togar, juga telah melalui proses diskusi bersama dengan sejumlah asosiasi asuransi, termasuk AAJI. Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya juga telah mengakomodasi kepentingan industri.

"Kalau terbit, bisa dibilang 90 persen hasil diskusi dengan industri. Ini untuk kebaikan bersama. Sudah *fair*," tuturnya ketika dihubungi, Senin, 31 Januari 2022.

Judul	Allianz Ajak Nasabah Kenali Diri Gapai Peluang di Tahun Macan Air
Nama Media	Marketeers.com
Newstrend	Optimisme Allianz di 2022
Halaman/URL	https://www.marketeers.com/allianz-ajak-nasabah-kenali-diri-gapai-peluang-di-tahun-macan-air/
Tanggal Berita	2022-02-02
Sentimen	Positif

COMMENT SECTION

By Bianca Astira

Posted on 02/02/2022

SHARE

TWEET

LIKE

EMAIL

COMMENTS

Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) memproyeksikan ekonomi Indonesia tahun ini akan tumbuh hingga 5.2% dibandingkan dengan pertumbuhan tahun lalu yang hanya 3.3%. Melihat hal tersebut, Allianz Indonesia menyadari bahwa edukasi bagi nasabah dapat menjadi salah satu langkah untuk mewujudkannya. Untuk itu, Allianz kembali menggelar webinar yang bertema *Market Outlook & Face Reading – Kenali Diri dan Peluang di Tahun Macan Air*.

"Komitmen dan usaha kami tetap berlanjut di tahun ini. Kami optimis tahun ini akan memberikan keberuntungan bagi kita semua. Melalui webinar ini, kami berharap dapat memberikan gambaran lebih lanjut mengenai Tahun Macan Air, sehingga dapat membantu nasabah dan keluarga mengambil keputusan finansial yang tepat di tahun ini," ujar Lasminoto, Chief Operating Officer Allianz Life Indonesia.

Belanja Mudah dan Aman
Bianca Astira

Menurut Ni Made Daryanti, Chief Investment Officer Allianz Life Indonesia ada empat peluang pada tahun 2022, yakni meliputi terkendalinya COVID-19, meningkatnya harga komoditas batubara, minyak kelapa sawit, dan nikel. Kemudian, meningkatnya level investasi serta perbaikan sektor manufaktur, kebijakan moneter dan fiskal yang akomodatif.

Ia menyampaikan bahwa keempat peluang tersebutlah yang menjadi harapan dan optimisme masyarakat dalam menjalankan rencana tahun ini. Ia menambahkan, beberapa risiko juga dapat terjadi di tahun ini yang patut diantisipasi. Di antaranya, kasus COVID-19 yang kembali tinggi, naiknya suku bunga global yang lebih cepat, tren inflasi global yang lebih tinggi dari yang diperkirakan serta risiko terjadinya geopolitik.

"Berangkat dari proyeksi tersebut Kami mengajak para nasabah Allianz untuk selalu melakukan review terhadap serangkaian polis yang dimiliki dan senantiasa menyesuaikan pilihan investasi sesuai dengan profil risiko, serta melihat kondisi pasar terkini demi mencapai tujuan finansial di masa depan," tegasnya.

Sementara itu Pakar Feng Shui Erwin Yap memberikan penjelasan terkait Tahun Macan Air yang identik dengan pohon atau tanaman yang lebat. Pohon atau elemen kayu juga melambangkan ekonomi tahun ini diprediksi akan semakin tumbuh dengan dinamis dan agresif yang disertai dengan kompetisi yang meningkat. Adapun perusahaan yang akan berhasil bertahan di tengah kompetisi Tahun Macan Air adalah perusahaan yang memiliki kekuatan di elemen kayu dengan regulasi *Green Economy* dan elemen tanah dengan regulasi *Labour Market*.

Belanja Mudah dan Aman
Bianca Astira

Sedangkan *Face Reading* adalah teknik membaca dan menganalisis wajah untuk mengenali peluang diri untuk meraih peluang di Tahun Macan Air. Erwin menjelaskan bahwa bagian wajah terbagi menjadi tiga bagian atau trinitas kosmik, yakni langit yang meliputi bagian dahi yang merepresentasikan usia masa muda sampai dengan umur 30 tahun.

Lalu Manusia yang meliputi bagian alis sampai ujung hidung yang merepresentasikan usia produktif dari 30 hingga 55 tahun. Terakhir Bumi yang meliputi bagian ujung hidung sampai ujung dagu yang merepresentasikan pensiun di atas 55 tahun.

Menurutnya, selagi usia muda bisa menginvestasikan sekitar 30%-40% dari pendapatan di portofolio investasi yang berisiko tinggi. Sedangkan usia produktif bisa mengambil investasi 50%-80% dari pendapatan di portofolio investasi yang berisiko rendah.

"Hal ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan *chi* atau energi, sehingga kondisi keuangan bisa tetap terjaga di setiap tahapan usia. Dengan mengetahui cara membaca dan menganalisis wajah, seseorang bisa mengenali peluang dirinya untuk meningkatkan kualitas hidup," ujar Erwin.

Judul	Soal Sengkarut Unit Link, LAPS SJK Siap Bantu Penyelesaian Sengketa
Nama Media	Wartaekonomi.co.id
Newstrend	Penyelesaian Masalah Asuransi
Halaman/URL	https://wartaekonomi.co.id/read390707/soal-sengkarut-unit-link-laps-sjk-siap-bantu-penyelesaian-sengketa
Tanggal Berita	2022-02-02
Sentimen	Netral

Kabar Finansial / Finansial

Soal Sengkarut Unit Link, LAPS SJK Siap Bantu Penyelesaian Sengketa

Rabu, 02 Februari 2022, 23:22 WIB



Kredit Foto: LAPS SJK

WE Online, Jakarta - Menanggapi pemberitaan mengenai sengketa sejumlah nasabah produk Unit Link dengan sejumlah perusahaan asuransi jiwa, Ketua Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) Himawan Subiantoro mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perihal perlindungan konsumen di Sektor Jasa Keuangan terkait sejumlah sengketa tersebut untuk dapat diselesaikan melalui LAPS SJK.

Himawan mengatakan forum penyelesaian sengketa di LAPS SJK terdiri dari dua layanan utama, yaitu mediasi dan arbitrase. Mediasi LAPS SJK adalah penyelesaian sengketa yang difasilitasi oleh seorang mediator LAPS SJK yang akan menjadi fasilitator perundingan antara para pihak dalam mencari solusi terbaik.

Sedangkan arbitrase adalah penyelesaian sengketa yang dipimpin oleh seorang arbiter atau majelis arbiter yang bisa memberikan putusan (award) berdasarkan keadilan dan kepatutan (ex aequo et bono) sepanjang putusan ex aequo et bono tersebut disepakati para pihak.



"Namun, agar LAPS SJK memiliki kewenangan absolut, nasabah produk unitlink dan perusahaan asuransi wajib memiliki kesepakatan tertulis bahwa para pihak bersedia untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui LAPS SJK. Tanpa adanya kesepakatan tersebut, LAPS SJK tidak bisa memfasilitasi," ujar Himawan di Jakarta, Rabu (2/2/2022).

Oleh karena itu, lanjut Himawan, bagi nasabah dan perusahaan asuransi yang akan menyelesaikan sengketa tersebut dipersilahkan berunding terlebih dahulu untuk pemilihan forumnya, kemudian mengajukan permohonan ke LAPS SJK. Baca Juga: [Praktisi Hukum: Nasabah Sebaiknya 'Lari' ke LAPS](#)

"Kami akan membantu agar prosesnya bisa dilakukan secara cepat dan netral," jelasnya.

Untuk diketahui, LAPS SJK bertugas melakukan penyelesaian sengketa masalah keuangan di luar pengadilan secara terintegrasi yang didirikan pada tanggal 22 September 2020 oleh Self Regulatory Organizations (SROs) dan asosiasi-asosiasi di lingkungan sektor jasa keuangan.



Fungsi dibentuknya lembaga ini adalah untuk penyelesaian sengketa perdata di sektor jasa keuangan yang berkaitan dengan penempatan dana konsumen di lembaga jasa keuangan dan pemanfaatan produk serta layanan di lembaga jasa keuangan.

Judul	OJK Ancam Moratorium Produk Unit Link
Nama Media	Investor.id
Newstrend	Tindakan OJK terhadap Unit Link
Halaman/URL	https://investor.id/finance/280986/ojk-ancam-moratorium-produk-unit-link
Tanggal Berita	2022-02-02
Sentimen	Netral



Ketua Dewan Komisiner OJK Wimboh Santoso dalam rapat kerja Komisi XI di Jakarta, Rabu (2/2). Foto: ISI

OJK Ancam Moratorium Produk *Unit Link*

Rabu, 3 Februari 2022 | 07:33 WIB
Theresa Sandra Desfika (theresa.sandra@investor.id)

JAKARTA, investor.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menghentikan sementara produk asuransi *unit link* dari tiga perusahaan asuransi apabila kasus dengan beberapa nasabahnya tak kunjung selesai. Bahkan, OJK juga mengancam bakal melakukan moratorium produk *unit link* bila memang terjadi permasalahan serupa yang masif.

Sebagaimana diketahui, kelompok nasabah korban asuransi *unit link* menolak opsi penyelesaian dari PT AIA Financial (AIA), PT AXA Mandiri Financial Services (AXA Mandiri), dan PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia). Nasabah ingin pengembalian penuh, sedangkan perusahaan asuransi menawarkan pengembalian 50% premi.

Baca juga: [Sengketa *Unit Link* Harus Diselesaikan per Kasus](#)

"Kami kasih batas waktu secepatnya dan penyelesaiannya adalah individu karena kontraknya memang individu. *Customer by customer. Case by case.* Untuk supaya dilakukan dicek kasusnya pasti. Kasusnya memang beda-beda," kata Ketua Dewan Komisiner OJK Wimboh Santoso dalam rapat kerja Komisi XI DPR di Jakarta, Rabu (2/2).

Selain itu, Wimboh menegaskan, pihaknya akan memberikan batas waktu penyelesaian sehingga diharapkan permasalahan antara perusahaan asuransi yang dimaksud dengan nasabahnya tak berlanjut-larut. Apabila, tidak kunjung juga ada penyelesaian, OJK bakal memberikan tindakan pada perusahaan-perusahaan tersebut agar sementara waktu tidak memasarkan produk yang sama.

"Ini kita tunggu kalau memang berlanjut-larut ya sampai ke pengadilan ya pasti itu kita lakukan untuk sementara perusahaan-perusahaan itu tidak boleh memasarkan produk yang sama dan masyarakat kita sampaikan ini. Ini juga berkaitan dengan transparansi," jelas Wimboh.

Selain itu, Wimboh menyatakan, OJK akan meminta perbankan untuk tidak mengageni tiga perusahaan itu dalam menjualkan produk yang sama. "Dan ini kami sudah koordinasi dengan Pak Heru sebagai KE perbankan (kepala eksekutif pengawas perbankan OJK) akan melakukan action itu bersamaan," ungkap Wimboh.

Dia menambahkan, OJK akan mempersilahkan perusahaan asuransi yang dimaksud menawarkan kembali produk yang sama apabila permasalahan dengan beberapa nasabah selesai dalam waktu cepat.

Baca juga: [Unit Link Beri Manfaat Rp 335 Triliun, tapi Perlu Pembinaan](#)

Lebih jauh, Wimboh menegaskan, OJK bakal melakukan moratorium produk *unit link* dari lembaga manapun apabila memang terjadi banyak permasalahan yang serupa terkait produk ini.

"Dalam kaidah yang lebih besar kalau memang satu produk itu menimbulkan permasalahan umum di industri, kita bisa bilang untuk sementara itu, lembaga manapun sementara produk itu kita moratorium. Baru kita kaji kembali kaidah-kaidahnya bahkan peraturannya kita ubah," tegas Wimboh.

Dia menyebutkan, *unit link* ini memang menjadi isu besar di dunia dan seluruh negara juga sedang mengajikanya. Produk ini marak, seperti di Amerika Serikat, Inggris, dan Eropa dan ini publikasinya sangat banyak.

Editor : Theresa Sandra Desfika (theresa.sandra@investor.id)

Judul	OJK Ultimatum Tiga Asuransi Jiwa Segera Selesaikan Masalah Unit Link
Nama Media	Investor Daily
Newstrend	Tindakan OJK terhadap Unit Link
Halaman/URL	23
Tanggal Berita	2022-02-03
Sentimen	Netral

OJK Ultimatum Tiga Asuransi Jiwa Segera Selesaikan Masalah Unit Link

JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengultimatum perusahaan asuransi jiwa AIA, Prudential, dan AXA Mandiri untuk segera menyelesaikan perselisihan (*dispute*) produk *unit link* yang akhir-akhir ini mencuat. Jika penyelesaian lambat, OJK tidak segan memberlakukan moratorium produk *unit link* pada tiga perusahaan tersebut, bahkan moratorium skala industri.

Oleh **Prisma Ardianto**

Ketua Dewan Komisiner OJK Wimboh Santoso menyatakan, pihaknya sudah memanggil direktur utama dari AIA, Prudential, dan AXA Mandiri untuk segera menyelesaikan *dispute unit link*. OJK pun memberikan batas waktu meski tidak menyebutkan secara rinci. Penyelesaian harus dilakukan secara individu, per nasabah, per kasus, supaya bisa mencapai titik temu.

"Dalam hal ini, kalau dalam batas waktu tidak bisa dilakukan dan bertele-tele, akan kita minta untuk menghentikan (pemasaran) produk baru itu, dari lembaga itu. Ini adalah proses normal pengawasan di seluruh dunia atau namanya CDO (*cease and desist order*), bisa kita lakukan," kata Wimboh saat Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (2/2).

Dia mengatakan, pihaknya tidak berharap proses penanganan *dispute unit link* itu berlanjut sampai ke LAPAS SJK atau pengadilan. Ada indikasi penyelesaian ke arah sana, maka potensi untuk OJK memberlakukan moratorium produk *unit link* untuk tiga perusahaan tersebut semakin besar. Bahkan, moratorium bisa diberlakukan bagi seluruh perusahaan asuransi. "Dalam kaidah lebih besar, kalau satu produk itu (*unit link*) menimbulkan masalah umum di industri, kita bisa bilang, lembaga manapun (penjualan) produk itu kita moratorium. Baru nanti kita kaji kembali kaidah-kaidahnya, bahkan peraturannya kita ubah bahwa produk harus dipahami secara umum, termasuk *risk appetite*-nya," jelas Wimboh.

Jika moratorium diberlakukan, OJK juga akan menyampaikan informasi tersebut kepada masyarakat. Begitu



Wimboh Santoso

juga larangan bagi perbankan sebagai mitra pemasar produk *unit link*. "Berikutnya akan kita buka kembali kalau bisa diselesaikan dalam waktu cepat," ucap Wimboh.

Dalam perkembangannya, OJK mencatat total 260 pemegang polis (pempol) dari AIA, Prudential, dan AXA Mandiri yang meminta dananya dikembalikan penuh. Sejumlah pempol itu mencatat total premi unit link premi senilai Rp 21,94 miliar. Ada 166 pempol dari tiga perusahaan tersebut yang mencatat klaim nilai tebus (*surrender*) sekitar Rp 3,81 miliar. Di sisi lain, baru sebanyak 60 pempol yang sepakat dengan total pengembalian dana sekitar Rp 3,36 miliar. Secara rinci, AIA mencatat 5 dari 84 pempol dengan pengembalian Rp 287,37 juta. Prudential mencatat 47 dari 121 pempol dengan pengembalian Rp 2,83 miliar. Selain itu, AXA Mandiri sebanyak 8 dari 55 pempol dengan nilai pengembalian sebesar Rp 247,74 juta.

Tiga Aspek Permasalahan
Di sisi lain, Kepala Eksekutif Pengawas IKNB OJK Riswinandi menyatakan,



Dalam hal ini, kalau dalam batas waktu tidak bisa dilakukan dan bertele-tele, akan kita minta untuk menghentikan (pemasaran) produk baru itu, dari lembaga itu.

Wimboh Santoso
Ketua Dewan Komisiner OJK

ada tiga aspek utama permasalahan dalam industri perasuransian. Pertama terkait dengan aspek operasional. OJK menemukan tidak optimalnya manajemen perseroan, adanya tugas yang rangkap, kurangnya komite-komite, kemudian juga tidak optimalnya peran pengawas internal dan aktuaris yang terkadang aktuaris ini jumlahnya terbatas di industri asuransi.

"Kita bersama-sama dengan perguruan tinggi untuk meningkatkan kehadiran aktuaris untuk bekerja di perusahaan asuransi dan dana pensiun. Kemudian masih rendahnya kualitas jasa *assurance* independen. Dari pemeriksaan audit, AP/KAP, aktuaris, dan penilai, pengawas harus melakukan beberapa kali pendalaman untuk bisa memahami keadaan sebenarnya dari perusahaan-perusahaan asuransi yang diperiksa," kata dia.

Aspek kedua mengenai pengelolaan

investasi. Temuan yang paling mendasak dan perlu menjadi perhatian adalah manajemen investasi yang belum sepenuhnya independen. "Jadi masih ada perusahaan-perusahaan konglomerasi menempatkan dana-dana premi pada perusahaan afiliasi yang statusnya perusahaan terbuka," jelas Riswinandi.

Menurut dia, memang diperkenankan menempatkan dalam bentuk saham atau surat utang, tapi ada aturannya bahwa pihak terafiliasi itu tidak boleh lebih dari 25% dari dana investasinya. Tapi yang terjadi pada salah satu perusahaan asuransi adalah menempatkan lebih dari 80% dana investasinya pada perusahaan terafiliasi.

Riswinandi juga menilai instrumen investasi dari perusahaan asuransi terbatas, sehingga perusahaan asuransi perlu menyesuaikan guna mencapai tanggung jawab atau kewajiban yang telah ditetapkan. Termasuk imbal hasil yang tidak sesuai dengan manfaat asuransi jangka panjang.

Aspek terakhir, sambung dia, beberapa hal terkait dengan produk dan distribusi. Produk dengan *loss ratio* tinggi misalnya, sekarang dirasakan pada asuransi kredit dan asuransi jiwa kredit. Demikian juga permasalahan pada produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (*PAYDI*) atau *unit link*.

Riswinandi menjelaskan, permasalahan datang dari profil nasabah yang bisa membeli produk *PAYDI* kerap tidak sesuai. Perekrutan dan pelatihan agen pemasar juga ditemukan tidak optimal, berikut target produksi premi yang ditetapkan. Turut ditemui bahwa agen pemasar tidak komprehensif dan transparan terkait biaya-biaya saat memasarkan produk, sehingga timbul *fraud* bahkan *dispute* di masa depan. Kini OJK dan asosiasi sedang membangun basis data untuk masalah *fraud* tersebut.

Judul	Anggota Komisi XI Minta OJK Buka Data Konglomerasi Fintech
Nama Media	Tribunnews.com
Newstrend	Permintaan Pembukaan Data Konglomerasi Fintech
Halaman/URL	https://www.tribunnews.com/bisnis/2022/02/03/anggota-komisi-xi-minta-ojk-buka-data-konglomerasi-fintech
Tanggal Berita	2022-02-03
Sentimen	Netral

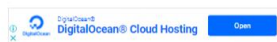
Anggota Komisi XI Minta OJK Buka Data Konglomerasi Fintech

Kamis, 3 Februari 2022 06:54 WIB

Penulis: Reynas Abdila
Editor: Sanusi



ILUSTRASI



Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR Muhammad Misbakhun meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuka data tentang konglomerasi perusahaan fintech.

Legislator Golkar itu menduga pemilik modal menggunakan orang lain untuk menjalankan fintech yang tak hanya menyediakan pinjaman dana tetapi juga sistem pembayaran.

Baca juga: [Penggerebekan Kantor Pinjol di PIK 2 Berawal dari Aduan Masyarakat, Polisi: Jangan Sungkan Laporan](#)



Menurut Misbakhun, pada saat ini terdapat 103 fintech yang terdaftar di OJK. Perinciannya ialah 95 konvensional dan 8 syariah.

"Masalah fintech ini sebenarnya bukan hanya peer to peer lending, tetapi ada yang sifatnya payment system. Ini bagaimana?" ujar Misbakhun dalam rapat kerja Komisi XI DPR dengan OJK di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (2/2/2022).

Ia menyatakan harus ada pengawasan terintegrasi terhadap payment system.

"Saya tidak melihat sebuah pengawasan yang terintegrasi," katanya.

Baca juga: [Fintech Dinilai Dapat Tingkatkan Akses dan Kemandirian Keuangan Masyarakat](#)

Misbakhun juga mengaku ingin mengetahui data tentang konglomerasi sektor keuangan.

Dia meminta OJK membuka data pemilik bank, status banknya sebagai emiten Tbk atau tidak, dan soal manajer investasi (MI).

Iklan untuk Anda: Wanita 64 Tahun dengan Wajah Bayi: Dia Lakukan Ini sebelum Tidur

Advertisement by Xpropt

"Dia punya perusahaan efek apa dan memperdagangkan saham siapa saja?" katanya.

Judul	OJK Segera Fit and Proper Test Calon BPA Bumiputera
Nama Media	Kontan
Newstrend	Tes Calon BPA Bumiputera
Halaman/URL	10
Tanggal Berita	2022-02-03
Sentimen	Netral

■ KASUS AJB BUMIPUTERA

OJK Segera Fit and Proper Test Calon BPA Bumiputera

JAKARTA. Jika tidak ada aral melintang Badan Perwakilan Anggota (BPA) Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 bakal segera terbentuk. Dengan terbentuknya salah satu organ penting asuransi berbentuk mutual tersebut diharapkan bisa mengurangi sengkabut kewajiban pembayaran para nasabah.

Kepala Eksekutif Pengawas IKNB Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Riswinandi menyampaikan, panitia telah menetapkan 9 dari 11 calon untuk menjalani *fit and proper test* oleh OJK.

"Data *fit and proper* sudah disampaikan. Kita minta kelengkapan informasi mereka, sambil menunggu yang dua ini bisa *submit* untuk lakukan *fit*

and proper," ujar Riswinandi, Rabu (2/2).

Dari 11 calon, dua calon dari daerah Sumbagsel dan DKI Jakarta-Banten belum mencapai kesepakatan untuk menetapkan nama. Penyebabnya masih terjadi beberapa benturan. OJK secara berkala mengawasi pelaksanaan BPA AJB Bumiputera melalui pertemuan melalui kanal virtual maupun kunjungan pengawas.

BPA AJB Bumiputera ini memang telah kosong sejak 26 Desember 2020. Sejak saat itu, beragam cara dilakukan agar segera terbentuk BPA baru. Tujuannya agar bisa menyelesaikan kasus gagal bayar.

Riswinandi menyampaikan,

OJK masih memberi kesempatan mengajukan rencana penyelesaian masalah AJB Bumiputera. Namun, ia mengingatkan, tetap perlu mengacu pada anggaran dasar.

Per Desember 2021, jumlah pemegang polis di AJB Bumiputera mencapai sekitar 2,16 juta dengan nilai pertanggungannya senilai Rp 20,08 triliun. Sementara, aset yang dimiliki oleh perusahaan ini hanya senilai Rp 10,7 triliun.

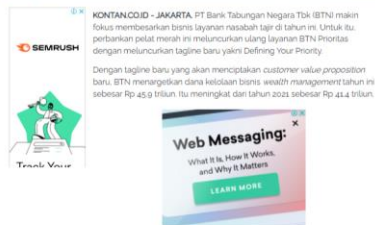
"Sebenarnya sudah terlihat jomplang-nya perusahaan ini jika ingin menyelesaikan kewajiban," ujar Riswinandi. Dan nasabah AJB Bumiputera hanya bisa menanti kapan hak mereka dibayar.

Adrianus Octaviano

Judul	Bidik Dana Kelolaan Nasabah Tajir Rp 45,9 Triliun di 2022, Ini Strategi BTN
Nama Media	Kontan.co.id
Newstrend	Re-launch BTN Prioritas
Halaman/URL	https://newssetup.kontan.co.id/news/bidik-dana-kelolaan-nasabah-tajir-rp-459-triliun-di-2022-ini-strategi-btn-1
Tanggal Berita	2022-02-03
Sentimen	Netral

Bidik Dana Kelolaan Nasabah Tajir Rp 45,9 Triliun di 2022, Ini Strategi BTN

Kontan, 03 Februari 2022 | 06:25 WIB | Reporter: Dina Mulyanti Halim



KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) makin fokus membesarkan bisnis layanan nasabah tajir di tahun ini. Untuk itu, perbankan pelat merah ini meluncurkan ulang layanan BTN Prioritas dengan meluncurkan tagline baru yakni *Defining Your Priority*.

Dengan tagline baru yang akan menciptakan *customer value proposition* baru, BTN menargetkan dana kelolaan bisnis *wealth management* tahun ini sebesar Rp 45,9 triliun. Itu meningkat dari tahun 2021 sebesar Rp 41,4 triliun.

Direktur Distribution and Retail Funding Bank BTN Jasmin mengatakan, kesadaran masyarakat untuk berinvestasi terus meningkat di Indonesia baik melalui reksadana, pasar saham maupun surat berharga lainnya. Namun banyak masyarakat yang belum mengerti mengenai *wealth management* yang mereka secara baik.

"Kami di Bank BTN ingin bisa membantu masyarakat untuk mengelola keuangan mereka secara baik. Untuk itulah Bank BTN menghadirkan kembali BTN Prioritas dengan konsep yang baru yakni *Defining Your Priority* dalam memenuhi kebutuhan nasabah," ujar Jasmin dalam konferensi pers peluncuran dan re-launching BTN Prioritas, *"Defining Your Priority"* di Jakarta, Rabu (2/2).

Dengan hadirnya wajah baru BTN Prioritas, Jasmin berharap Dana Pihak Ketiga (DPK) yang ditargetkan tumbuh *double-digit* bisa tercapai. Selain itu, beragam produk yang ditawarkan BTN Prioritas juga bisa mendorong kenaikan *fee based income* perseroan.

Baca Juga: [BTN Catatkan Pertumbuhan Penyaluran FLP 47% di Januari](#)

Jasmin mengungkapkan, perseroan menyadari bahwa setiap nasabah memiliki prioritas yang berbeda dalam setiap aspek kehidupan. Itulah sebabnya BTN Prioritas hadir untuk memberikan solusi finansial dan layanan yang relevan dan berkesinambungan untuk setiap Nasabah BTN Prioritas.

Dia menjelaskan, *Defining Your Priority* juga merupakan semangat baru dari BTN Prioritas agar Nasabah memiliki kebebasan memilih kebutuhan dan layanan prioritas yang sesuai dengan gaya hidup mereka.

Nasabah dapat menikmati kebebasan sesungguhnya dengan berbagai layanan spesial dan penawaran eksklusif dari BTN Prioritas dan jadilah pribadi yang istimewa karena kebebasan memilih adalah arti sesungguhnya dari nasabah prioritas.

Menurut Jasmin, dengan peluncuran *Defining Your Priority*, BTN Prioritas akan meningkatkan layanan dan menghadirkan inovasi-inovasi terbaru dari segi variasi produk, manfaat terbaik, *privilege* serta layanan istimewa melalui produk dana, investasi, dan proteksi yang beragam, serta *loyalty program*, dan *priority service*.

Dari *action plan* tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan dan kepuasan Nasabah BTN Prioritas, sehingga semakin mempercayakan BTN Prioritas dalam mengelola finansial Nasabah.

"BTN Prioritas menyadari bahwa untuk meningkatkan *customer loyalty* dan *experience* saat ini tidak lagi hanya berfokus pada solusi produk saja namun juga pada kemampuan untuk memahami kebutuhan Nasabah di segala aspek kehidupannya melalui berbagai *plan loyalty reward*" katanya.



Selanjutnya >

Judul	Kejagung Periksa Kepala Investasi Perbankan Perusahaan Terkait Kasus Korupsi Taspen
Nama Media	Liputan6.com
Newstrend	Dugaan Korupsi Asuransi Taspen
Halaman/URL	https://www.liputan6.com/news/read/4876495/kejagung-periksa-kepala-investasi-perbankan-perusahaan-terkait-kasus-korupsi-taspen
Tanggal Berita	2022-02-03
Sentimen	Netral

Kejagung Periksa Kepala Investasi Perbankan Perusahaan Terkait Kasus Korupsi Taspen



Nanda Perdana Putra
03 Feb 2022, 03:33 WIB



Share
15



Gedung Kejaksaan Agung RI (Kejagung). (Liputan6.com/Muhammad Radityo Priyasmoro)

Liputan6.com, Jakarta - Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali memeriksa saksi terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan dana investasi PT Asuransi Jiwa Taspen Tahun 2017-2020.

Kapuspenkum Kejagung Leonard Eben Ezer Sumanjuntak menyampaikan, pihaknya memeriksa satu saksi yaitu N selaku Head of Investment Banking PT Valbury Sekuritas Indonesia.

BACA JUGA:

[Wacana Koruptor 50 juta Tak Diproses, Kejagung: Pelanggaran administratif seperti kelebihan Bayar](#)

"Diperiksa terkait pemeriksaan lanjutan untuk menerangkan proses pembentukan dan penawaran MTN PT Prioritas Raditya Multifinance," tutur Leonard dalam keterangannya, Rabu (2/2/2022).

Leonard mengatakan, pemeriksaan tersebut dilakukan untuk menggali keterangan guna kepentingan penyidikan, tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri oleh saksi.

"Guna menemukan fakta hukum tentang tindak pidana korupsi yang terjadi di PT Asuransi Jiwa Taspen," kata Leonard.

Sebelumnya, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung mulai menyelidiki kasus dugaan tindak pidana korupsi di PT Asuransi Jiwa Taspen periode 2017-2020.

Penyelidikan tersebut berdasarkan surat perintah penyelidikan (sprindik) perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan dana investasi di PT Taspen yang diterbitkan oleh Jampidsus Kejagung, Selasa 4 Januari 2022 lalu.

"Surat Perintah Penyidikan yang ditandatangani oleh Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-01/F.2/Fd.2/01/2022 tanggal 4 Januari 2022," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Sumanjuntak dalam keterangan tertulisnya, Rabu 12 Januari 2022.

Leonard menjelaskan bahwa posisi kasus pada tanggal 17 Oktober 2017, PT Taspen AJT melakukan penempatan dana investasi sebesar Rp 150 miliar dalam bentuk kontrak pengelolaan dana (KPD) di PT Emco Asset Managemen selaku Manajer Investasi dengan underlying berupa medium term note (MTN) PT Prioritas Raditya Multifinance (PT PRM).

Judul	Tak Ada Rencana Penyehatan, Bumiputera Akan Dilikuidasi
Nama Media	Investor Daily
Newstrend	Pencabutan Izin AJB Bumiputera
Halaman/URL	24
Tanggal Berita	2022-02-03
Sentimen	Netral

DEFISIT 2021 CAPAI RP 21,9 TRILIUN

Tak Ada Rencana Penyehatan, Bumiputera akan Dilikuidasi

JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mencabut izin usaha dan melikuidasi Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912, karena perusahaan tidak memiliki rencana penyehatan yang jelas. OJK menilai beban perusahaan asuransi *mutual* itu semakin berat untuk memenuhi kewajiban saat ini dan di masa depan.

Oleh Prisma Ardianto

Kepala Eksekutif Pengawas IKNB OJK Riswinandi menyampaikan, permasalahan Bumiputera sudah berlangsung sejak tahun 1997 dan sudah banyak waktu yang diberikan regulator untuk para pengurus menyelesaikan perusahaan. Kini, OJK secara tegas menekankan agar penyelesaian permasalahan harus mengikuti anggaran dasar (AD) perusahaan.

Dalam AD tersebut, sudah diatur bahwa jika perusahaan membukukan kerugian, maka secara pro rata dibebankan kepada para pemegang saham yang juga merupakan para pemegang polis. Namun pengurus Bumiputera tidak kunjung menjalankan ketentuan tersebut. OJK pun melihat tidak ada opsi penyelesaian yang jelas dan meminta dukungan dari Komisi XI DPR untuk mendorong ketentuan itu dijalankan.

"Karena aset yang ada itu properti Rp 6 triliun, defisit sudah lebih Rp 21 triliun, utang klaim yang belum dibayar sudah Rp 8 triliun. Keputusan kita soal Bumiputera, pada titiknya mungkin ini harus kita cabut izin, nanti bagaimana penyelesaiannya tentu likuidator yang akan lakukan," kata Riswinandi saat Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (2/2). Di memaparkan, kondisi keuangan Bumiputera sudah sulit untuk diselamatkan, apalagi mengingat perusahaan tersebut berkonsep *mutual*. Catatan OJK, total aset Bumiputera per Desember 2021 sebesar Rp 10,7 triliun, dengan aset properti sebesar Rp 6 triliun. Sementara itu, liabilitas sudah mencapai Rp 32,63 triliun.

"Jadi sudah ada defisit kurang lebih Rp 21,9 triliun. Secara kesehatan, RBC-nya sudah jauh dari persyaratan 1.184,77%, rasio kecukupan investasi (RKI) 12,11% ini jauh dari standar yang seharusnya di atas 100%. Kemudian rasio likuiditasnya 16,49%, ini juga jauh di bawah standar sekurang-kurangnya 100%. Sedangkan RBC seharusnya minimum 120%," beber Riswinandi.

Bumiputera memiliki 2.161.245 peserta per Desember 2021. Jumlah itu sudah jauh menurun dibandingkan total 6,5 juta peserta pada 2016, sebelum dilakukan perbaikan data. Adapun nilai kontrak pertanggungan dari 2,16 juta peserta itu disebut senilai Rp 20,08 triliun. "Jumlah Rp 20,08 triliun ini diibandingkan dengan aset Rp 10,7 triliun, dengan nilai aset properti



Riswinandi

hanya Rp 6 triliun, jadi memang sudah terlihat jomplangnya perusahaan ini kalau mau menyelesaikan kewajiban. Tapi kalau dilihat lagi dari nilai kontrak 2,16 juta pemegang polis ini, nilai kontrak (masa depan) Rp 62,9 triliun, jadi memang sudah sangat-sangat berat sekali," ungkap Riswinandi.

Permasalahan lain, Bumiputera memiliki utang klaim kepada 494.178 polis terhadap peserta 521.917 tertanggung. Nilai kontrak utang klaim itu Rp 5,4 triliun. "Inipun kalau disetujui lagi dengan nilai aset properti Rp 6 triliun, akan sangat terlibat bahwa penyelesaian dengan cara biasa akan sangat berat," imbuh Riswinandi.

Dia menuturkan, tantangan penyelesaian permasalahan Bumiputera sebagai perusahaan *mutual* adalah karena sulit mengajar para pemegang polis yang juga bertindak sebagai pemegang saham. Hal itu berbeda dengan perusahaan asuransi komersial lainnya yang dimiliki badan usaha atau perorangan, sehingga mudah untuk meminta pertanggung jawaban atas permasalahan perusahaan.

Tak Ada BPA

Jangankan untuk membenahi permasalahan keuangan, Kursi Badan Perwakilan Anggota (BPA) Bumiputera sebagai perwakilan para pemegang polis dan pemegang saham sudah kosong sejak 26 Desember 2020. Dalam perkembangan terakhir, OJK berupaya memfasilitasi terbentuknya BPA melalui panitia pemilihan yang berasal dari perwakilan manajemen, tiga kelompok nasabah, agen, serta para karyawan.

Panitia tersebut sudah bekerja dengan menetapkan sembilan dari sebelas calon BPA dari berbagai



Karena aset yang ada itu properti Rp 6 triliun, defisit sudah lebih Rp 21 triliun, utang klaim yang belum dibayar sudah Rp 8 triliun. Keputusan kita soal Bumiputera, pada titiknya mungkin ini harus kita cabut izin, nanti bagaimana penyelesaiannya tentu likuidator yang akan lakukan.

Riswinandi

Kepala Eksekutif Pengawas IKNB OJK

perwakilan daerah. Adapun dua perwakilan masing-masing dari Sumatra Bagian Selatan dan DKI Jakarta dan Banten belum ditetapkan karena masih terjadi benturan kesepakatan. "Data *fit and proper* sudah disampaikan, kita mista kelengkapan informasinya sambil menunggu dua calon ini bisa *di-submit* untuk dilakukan *fit and proper test*," kata Riswinandi.

Dia menegaskan, regulator sudah cukup lama memberikan kesempatan untuk Bumiputera melakukan perbaikan keuangan tapi tak kunjung menunjukkan hasil. Pembentukan BPA yang akan melahirkan direksi dan komisaris itu akan diminatkan rencana penyehatn keuangan (BPK), termasuk menjalankan AD untuk membagi kerugian secara *pro-rata*. Ini menjadi kesempatan terakhir bagi Bumiputera.

"Secara kesehatan, sebetulnya kita memberikan diskresi, ada penyimpanan yang diberikan sementara untuk memberikan kesempatan mereka bekerja. Ini kelihatannya akan dilakukan pembatalan. Kalau pembatalan dilakukan, yang terkait dengan kesehatan itu mereka tidak akan memenuhi, ini tentu ujungnya sesuai dengan pengawasan prudensial, ujung paling konservatif adalah tidak dapat dilanjutkannya usaha ini," pungkas Riswinandi.

Judul	OJK Keluarkan Ketentuan Penyempurnaan PAYDI dan Fintech Lending
Nama Media	Edisimedan.com
Newstrend	Kebijakan Baru Unit Link
Halaman/URL	https://edisimedan.com/2022/02/02/ojk-keluarkan-ketentuan-penyempurnaan-paydi-dan-fintech-lending/
Tanggal Berita	2022-02-02
Sentimen	Netral

OJK Keluarkan Ketentuan Penyempurnaan PAYDI dan Fintech Lending

19 Views, 0 Comments, 0 Likes



EDISIMEDAN.com, MEDAN – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan segera mengeluarkan dua ketentuan di bidang Industri Keuangan NonBank (IKNB) yaitu peraturan mengenai Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI atau unilink) dan perubahan peraturan mengenai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (fintech peer to peer lending).

"Kedua peraturan itu akan dikeluarkan mengingat pentingnya penguatan operasional industri perasurancian dan fintech P2P lending yang harus seiring dengan peningkatan aspek perlindungan konsumen," kata Kepala Eksekutif Pengawas IKNB OJK, Riswanandi.

Menurutnya, penyempurnaan aturan PAYDI antara lain meliputi area spesifikasi produk, persyaratan perusahaan untuk dapat menjual PAYDI, praktik pemasaran, transparansi produk dan pengelolaan investasi.



"Upaya penguatan regulasi tersebut bertujuan agar permasalahan pemasukan khususnya ketidakpahaman nasabah atas PAYDI dapat diminimalisir dan perusahaan asuransi dapat meningkatkan tata kelola dan manajemen risiko dengan lebih baik," kata Riswanandi.

Sementara perubahan ketentuan fintech P2P lending antara lain mengatur kepemilikan platform layanan pendanaan bersama, bentuk badan hukum, modal pendirian, nilai ekuitas, batas maksimum pendanaan, pemegang saham pengendali dan sejumlah larangan untuk perlindungan konsumen seperti tatacara pengiklan/rid.

Judul	Berita Foto - RENCANA PENYEMPURNAAN ATURAN PAYDI
Nama Media	Bisnis Indonesia
Newstrend	Kebijakan Baru Unit Link
Halaman/URL	15
Tanggal Berita	2022-02-03
Sentimen	Netral

■ RENCANA PENYEMPURNAAN ATURAN PAYDI



Bisnis/Arief Hermawan P

Petugas membersihkan salah satu ruangan di kantor Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) di Jakarta, Rabu (2/2). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menerbitkan ketentuan baru untuk produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (Paydi) atau

unit-linked, guna meningkatkan aspek perlindungan konsumen. Penyempurnaan aturan, antara lain meliputi area spesifikasi produk, persyaratan perusahaan, praktik pemasaran, transparansi produk, dan pengelolaan investasi.

Judul	Cegah Kasus Jiwasraya Jilid Dua
Nama Media	Jabar Ekspres
Newstrend	Kebijakan Baru Unit Link
Halaman/URL	16
Tanggal Berita	2022-02-03
Sentimen	Netral



JANGAN TERULANG: OJK berencana menerbitkan produk asuransi sebagai cara agar kasus Jiwasraya tak terulang lagi.

Cegah Kasus Jiwasraya Jilid Dua

UNTUK mencegah terjadinya kasus Jiwasraya jilid dua, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bakal menerbitkan peraturan produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) alias unitlink. Hal itu seiring peningkatan aduan produk asuransi dan investasi.

Penguatan regulasi terkait syarat perusahaan yang dapat memasarkan unitlink, kriteria produk, kewajiban perusahaan, serta ketentuan pemasaran dan transparansi produk.

Founder Perkumpulan Agen Asuransi Indonesia (PAAI) Wong Sandy Surya mengatakan, perlu ada keseragaman mekanisme *free look*. Sehingga, memungkinkan nasabah membatalkan polisnya jika dirasa tidak cocok. "PAAI belum yakin apakah semua perusahaan asuran-

si melakukan mekanisme itu," ujarnya, kemarin.

Sandy juga meminta asumsi cuti premi di ilustrasi dihilangkan. Permintaan itu bukannya tanpa alasan. Sebab, terkadang disalahgunakan oleh para agen nakal.

Mereka biasanya menjual ke calon pemegang polis dengan mengatakan hanya cukup membayar dalam kurun waktu tertentu. Misalnya, bayar cukup 10 tahun tanpa perlu bayar lagi.

"Perlu ditekankan bahwa produk unitlink perlu dibayar seumur hidup," imbuhnya.

Sandy mendukung wacana OJK untuk mengatur saham yang boleh ditempatkan dalam investasi di produk unitlink. Dengan begitu, ada kewajiban laporan penempatan aset setiap

bulan dari perusahaan ke OJK.

"Untuk mencegah kongkalikong seperti kasus Jiwasraya, investasi di saham yang busuk," tegasnya.

Eksekutif Pengawas IKNB OJK Riswinandi menyatakan, penguatan peraturan unitlink bertujuan agar permasalahan pemasaran, khususnya ketidakpahaman nasabah atas PAYDI, dapat diminimalisasi. Di sisi lain, perusahaan asuransi dapat meningkatkan tata kelola dan manajemen risiko dengan lebih baik.

Menurut dia, perusahaan yang memasarkan unitlink harus memiliki sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur yang memadai. Misalnya, aktuaris, ahli investasi, sistem informasi yang mendukung pengelolaan produk unitlink, dan modal yang cukup (*jpc/drx*)